TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 23 - 29 Juli 2025
No. 4096
Tahun LV



8 Jurus Pemerintah Tahan Laju Harga Beras

10 Okta, sang Kreator Fried Chicken Almaz

14 Lepas Ekspor Pertanian, Wamentan Apresiasi Milenial Jawa Tengah



www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

Tugas Baru Gapoktan

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), wadah kelompok tani yang selama ini menjadi jembatan antar kelompok tani mendapat amanah baru dari pemerintah sebagai penyalur pupuk subsidi. Meski sifatnya tidak mandatori atau wajib, tugas tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kelembagaan petani tersebut.

Pertanyaannya sejauh mana kesiapan Gapoktan menjadi perpanjangtanganan pemerintah untuk mendistribusikan sarana produksi penyubur tanaman tersebut? Pasalnya, selama ini Gapoktan sebatas forum bagi petani dalam urusan budidaya tanaman dan tak berkecimpung dalam bisnis.

Meski ada dibeberapa daerah Gapoktan yang telah terjun melakoni bisnis pertanian, tapi jumlahnya tak banyak. Kini dengan kebijakan baru tata kelola pupuk subsidi, pemerintah akan mentransformasikan Gapoktan sebagai lokasi titik serah. Nantinya petani tidak lagi harus menebus ke kios atau pengecer, tapi bisa langsung ke Gapoktan.

Dengan memotong rantai distribusi yang selama ini cukup panjang, setidaknya melalui 4 lini dari produsen sampai ke kios, pemerintah berharap petani bisa lebih dekat dan mudah mendapatkan pupuk subsidi. Tak ada lagi keluhan kelangkaan pupuk yang kerap terdengar saat musim tanam tiba. Sasaran 6 T yang kini ditambah menjadi 7 Tepat (waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima) bisa tercapai.

Di atas kertas memang mudah. Namun jika melihat kondisi Gapoktan yang tersebar di seluruh Nusantara, maka tak mudah menjadikannya sebagai titik serah pupuk bersubsidi. Persoalan internal Gapoktan yang harus dibenahi cukup banyak. Dari mulai soal permodalan, ketersediaan gudang penyimpanan, keterbatasan SDM manajerial dan marjin yang relatif kecil. Kendala-kendala tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Terlihat dari hasil verifikasi PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), pada tahap I ada 10 usulan koperasi berdasarkan SIMLUHTAN (Sistem Penyuluh Pertanian) per 20 Februari 2025. Dari usulan tersebut 7 koperasi dinyatakan layak sebagai calon penyalur, 4 koperasi dinyatakan ditunjuk sebagai calon penyalur.

Namun pada tahap II ketika pemerintah mengusulkan Gapoktan sebagai penyalur pupuk subsidi. Dari 142 Gapoktan yang dianggap siap sebagai penyalur, ternyata hanya 80 Gapoktan yang dinyatakan layak sebagai calon penyalur. Kemudian pada tahap III, dari 214 Gapoktan yang siap sebagai penyalur, hanya 129 Gapoktan dinyatakan layak sebagai calon penyalur.

Dengan demikian dari tahap II dan III, total ada 209 Gapoktan dinyatakan layak sebagai calon penyalur. Namun setelah diverifikasi lebih lanjut, hanya 132 gapoktan yang ditunjuk sebagai calon penyalur, sedangkan 77 Gapoktan tidak ditunjuk sebagai calon penyalur. Dengan luas areal lahan pertanian yang cukup besar, angka Gapoktan yang memenuhi syarat sebagai penyalur pupuk bersubsidi ralatif masih kecil.

Di balik masih banyaknya kendala, tapi tata kelola pupuk subsidi yang baru menjadi momen besar membenahi kelembagaan Gapoktan. Sayap Gapoktan bisa diperlebar menjadi lembaga bisnis baru. Bahkan masuk dalam bagian program pemerintah lainnya, Koperasi Desa Merah Putih.



M ANMENYAPA

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Keberhasilan Pertanian di Tangan Generasi Muda

Momen kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa, dosen, dan pimpinan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Sabtu (19/7), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberhasilan sektor pertanian masa depan sangat ditentukan oleh peran generasi muda.

Saat kuliah umum yang mengangkat tema "Inovasi dan Teknologi dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani", Amran menekankan filosofi hidup yang membentuk kesuksesannya di dunia pertanian dan pemerintahan yakni keyakinan, tindakan, dan konsistensi.

Kami sampaikan saat ini bahwa membangun pertanian masa depan bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tapi juga soal mentalitas dan karakter pelaku utamanya. Kalau tidak yakin pada diri sendiri, jangan harap pertanian bisa jadi tulang punggung bangsa. Generasi muda harus yakin, berani bertindak, dan konsisten berkontribusi.

Kepada mahasiswa, kami menganggap peran kalian sangat penting sebagai agen perubahan yang siap menjawab tantangan global, termasuk krisis pangan dunia. Jadi saat ini kami mendorong mahasiswa untuk keluar dari zona nyaman dan aktif terlibat dalam transformasi pertanian Indonesia. Masa depan pertanian ada di tangan anak muda. Jangan hanya jadi penonton. Turun ke lapangan, pahami realita petani, dan jadilah bagian dari solusi.

Kita harus bangga Presiden Prabowo Subianto mempunyai visi besar dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Pangan merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa ditawar, karena menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, bahkan politik bangsa. Kalau pangan terganggu, negara bisa runtuh. Itulah kenapa Presiden serius menggarap pertanian, bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tapi untuk 1.000 tahun mendatang.

Untuk generasi muda yang ingin terjun ke petanian, kami sampaikan bahwa pemerintah saat ini mendorong hilirisasi pertanian . Karena apa? Hilirisasi memiliki potensi nilai tambah tinggi. Contohnya, kelapa yang hanya bernilai Rp 1.000 di tingkat petani bisa diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) dengan nilai jual mencapai Rp 145.000 per liter. Ini potensi luar biasa. Dengan hilirisasi, kita bisa menciptakan jutaan lapangan kerja dan membangkitkan ekonomi desa.

Program hilirisasi yang sedang dikembangkan Kementerian Pertanian berpotensi menyerap hingga 8,6 juta tenaga kerja dengan total investasi mencapai Rp 371 triliun. Investasi ini diarahkan untuk memperkuat industri pengolahan hasil pertanian dan mendorong generasi muda terlibat langsung dalam rantai nilai pertanian.

Tak lupa, saya juga mengingatkan bahwa modernisasi dan hilirisasi pertanian harus dibarengi dengan etos kerja yang tinggi dan konsistensi dalam belajar serta bertindak. Bangun jam 4 pagi, belajar 10 jam sehari, tidur jam 11 malam. Hanya karakter seperti itu yang bisa mengubah wajah pertanian kita.

Kami tidak hanya memotivasi, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi mahasiswa bahwa pertanian bukanlah masa lalu, melainkan masa depan Indonesia. Dan generasi mudalah yang akan menjadi penggeraknya.

SAUNG TANI

Presiden Prabowo akhirnya luncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten
- Bisnis baru warga desa

Gapoktan bisa jadi penyalur pupuk subsidi
- Peluang manis atau tantangan?

Harga beras bergerak naik, Pemerintah gelar Operasi Pasar beras besar-besaran
- Was-was juga...

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Istimewa

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Saat Cuaca Ekstrem Ganggu Nafsu Kawin Sapi



Musim makin tak menentu, bukan cuma manusia yang kelimpungan. Di kandang-kandang ternak, sapi-sapi betina mulai ogah birahi, pejantan pun lesu, akibat cuaca ekstrem yang makin menggila.

Musim seolah tak punya pola. Pagi bisa terik menyengat, sore hujan deras datang mendadak, lalu malam jadi gerah dan lembap tak tertahankan. Bagi manusia, cuaca seperti ini bikin tubuh gampang lelah dan suasana hati naik-turun.

Tapi bagi hewan ternak, terutama sapi, dampaknya lebih dari sekadar tidak nyaman. Cuaca ekstrem membuat tubuh mereka bekerja keras menjaga suhu tubuh, dan perlahan tapi pasti, memengaruhi kesehatan, bahkan mengganggu fungsi reproduksi.

Perubahan iklim bukan sekadar fenomena alam yang terjadi jauh di luar sana. Ia hadir di kandang-kandang peternakan, masuk lewat udara panas dan kelembapan tinggi, lalu diam-diam menyerang sistem tubuh sapi. Kenaikan suhu dan frekuensi gelombang panas membuat hewan mengalami stres termal.

Mereka harus mengeluarkan energi ekstra hanya untuk bertahan hidup, bernapas lebih cepat, berkeringat lebih banyak, menurunkan produksi panas tubuh agar tidak terkena hipertermia.

Akibatnya? Nafsu makan menurun drastis. Sapi menjadi enggan mengunyah serat kasar, produksi air liur ikut turun, dan motilitas rumen melambat. Kondisi ini memicu ketidakseimbangan mikroba rumen yang berujung pada asidosis, salah satu gangguan metabolisme serius.

Ketika pakan masuk tidak sebanding dengan energi yang dibutuhkan, sapi mulai memecah lemak tubuh sebagai cadangan. Tapi pemecahan lemak secara besar-besaran ini memicu akumulasi benda keton dalam darah, menyebabkan ketosis, penyakit metabolik yang umum terjadi saat keseimbangan energi terganggu parah.

Tidak hanya itu, mobilisasi lemak dalam jumlah besar juga bisa mengganggu fungsi hati, menyebabkan lipodosis atau hati berlemak. Penurunan fungsi hati ini ditandai dengan menurunnya kadar albumin dan aktivitas enzim hati, memperburuk daya tahan tubuh. Dan ketika sistem kekebalan melemah, sapi menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit.

Yang paling mencolok, gangguan akibat stres panas ini juga merembet ke urusan reproduksi. Sapi betina kehilangan birahi, siklus estrus jadi tidak teratur, dan tingkat keberhasilan inseminasi buatan menurun drastis.

Sementara sapi jantan pun tak luput dari dampak: produksi sperma menurun, kualitasnya menurun, gairah kawin pun merosot. Dalam dunia peternakan, ini berarti produksi anakan turun, regenerasi ternak terganggu, dan produktivitas jangka panjang menurun.

Pada musim panas, kadar antioksidan dalam darah sapi dara juga terbukti lebih rendah dibandingkan musim dingin. Zat seperti vitamin E dan karoten yang berperan melawan stres oksidatif ikut menurun.

Di sisi lain, nilai zat metabolit oksigen reaktif justru meningkat, memperparah kondisi tubuh. Tak heran, stres panas ini juga mengubah parameter darah dengan jumlah leukosit meningkat tajam, sedangkan eritrosit dan hemoglobin justru menurun, mengindikasikan tubuh berada dalam kondisi tidak stabil.

Bukan hanya dampak langsung. Perubahan iklim juga ikut mendorong munculnya ancaman tidak langsung yang tak kalah serius. Perubahan suhu, kelembapan, dan curah hujan yang tidak menentu menciptakan lingkungan ideal bagi vektor penyakit seperti nyamuk dan lalat berkembang biak.

Penyakit-penyakit tropis yang sebelumnya hanya muncul di daerah tertentu kini bisa menyebar lebih luas, bahkan menyeberang benua. Belum lagi jamur penghasil mikotoksin yang tumbuh subur di kondisi lembap, mengkontaminasi pakan, dan bisa merusak organ-organ vital seperti hati, ginjal, bahkan sistem reproduksi.

Harus Adaptasi

Melihat semua ini, dunia peternakan jelas tak bisa lagi bersikap pasif. Adaptasi adalah keharusan. Mulai dari desain kandang yang memperhatikan sirkulasi udara, pemberian pakan dengan kandungan nutrisi dan antioksidan tinggi, hingga manajemen reproduksi yang lebih cermat.

Peternak juga harus peka terhadap perubahan perilaku ternak, karena di situlah seringkali tersembunyi tanda-tanda awal bahwa tubuh mereka sedang dalam tekanan.

Perubahan iklim adalah krisis global, tapi dampaknya sangat lokal dan terasa nyata di kandang sapi di ujung desa. Dan ketika sapi-sapi mulai ogah birahi, itu bukan sekadar urusan kawin yang tertunda, melainkan sinyal bahwa bumi kita sedang demam, dan peternakan menjadi salah satu korbannya.

Maka, menjaga kesehatan ternak di tengah iklim yang tak menentu bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga tentang bertahan dalam dunia yang terus berubah.

Penulis: Yoceu Hadinovianti
Pusat Penyuluhan
BPPSDMP Ksmentan

China Mengubah Bisnis Gula Dunia

CATATAN Begawan



Perkembangan terkini di China yang bisa berdampak pada Industri gula di masa depan. Ilmuwan China mengubah CO_2 menjadi gula. Peneliti Tiongkok dari Institut Bioteknologi Industri Tianjin, yang terdiri dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok (CAS) telah mengembangkan metode inovatif untuk mengubah metanol yang dihasilkan dari CO_2 menjadi gula.

Metode ini, yang dikaitkan dengan penangkapan CO_2, dapat berkontribusi pada produksi pangan di masa depan. Jika budidaya bit gula atau tebu tradisional membutuhkan lahan yang luas dan mengonsumsi air dalam jumlah yang signifikan, maka tidak seperti metode baru yang diusulkan para ilmuwan Tiongkok.

Para ilmuwan telah menggunakan enzim untuk mengubah metanol dari emisi industri dan pengolahan CO_2 secara kimia menjadi gula. Sistem ini tidak hanya menghasilkan sukrosa, tetapi juga dapat diadaptasi untuk menghasilkan karbohidrat penting lainnya, seperti fruktosa dan pati.

Perkembangan ini menandai langkah penting menuju produksi produk langsung dari bahan kimia tanpa melalui pertanian tradisional. Meskipun Tiongkok mampu menanam bit gula dan tebu, negara tersebut masih mengimpor sekitar 5 juta ton gula per tahun untuk memenuhi permintaannya yang mencapai 15 juta ton per tahun.

Perubahan iklim memberikan tekanan yang semakin besar pada pertanian di Tiongkok dan di seluruh dunia. Karena itu, para peneliti Tiongkok mencari alternatif yang lebih efisien dan berskala besar untuk menciptakan produk pangan .

Pada tahun 2021, sekelompok peneliti Tiongkok lainnya dari Institut Fisika Kimia Dalian telah mengembangkan metode suhu rendah untuk mengubah CO_2 menjadi metanol. Hal ini membuka jalan bagi konversi limbah karbon menjadi bahan baku untuk produksi bahan kimia berharga seperti gula.

Berdasarkan keberhasilan ini, tim peneliti dari Institut Tianjin telah mengembangkan cara yang sangat efisien untuk mengubah metanol menjadi gula melalui serangkaian reaksi kimia yang cepat dan hemat energi. Mereka mencapai tingkat konversi yang mengesankan, yaitu 86%.

Dengan menggunakan sistem yang sama, para peneliti berhasil mensintesis fruktosa, amilosa, amilopektin, selobiosa, dan selooligosakarida — karbohidrat yang tidak hanya digunakan dalam industri makanan, tetapi juga dalam industri farmasi dan sektor industri lainnya. Mereka berencana untuk meningkatkan efisiensi enzim dan membuat sistem ini lebih stabil dan andal untuk aplikasi industri.

Sumber: South China Morning Post

GAPOKTAN JADI PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI



Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuka kesempatan bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Kesempatan tersebut bukan hanya peluang, tapi juga tantangan yang juga tak mudah bisa dilakoni kelembagaan petani tersebut.

Bagi Ngadiman, Ketua Gapoktan Mlale, Kecamatan Jenar, Sragen Jawa Tengah, menjadi penyalur pupuk subdisi memang sudah dijalani sejak lama yakni sejak tahun 2009. Atas inisiatif Pengurus Gapoktan, Poktan dan dorongan Penyuluh Pendaping serta dukungan dari Pemerintah Desa, Gapoktan Mlale kini tak canggung lagi saat pemerintah menetapkan Gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi.

Bagi Gapoktan yang selama ini sebatas menjadi wadah diskusi bagi petani dalam berusaha tani bertransformasi menjadi kelembangaan ekonomi petani yang terjun dalam bisnis memag tak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai kendala dihadapi Gapoktan.

Berbagi pengalaman dengan gapoktan lain yang akan menjadi penyalur pupuk bersubsidi, Nagdiman bercerita. Awalnya Gapoktan Mlale memiliki usaha penyalur pupuk subsidi karena mendapatkan bantuan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Namun diakui, modal tesebut tidak memadai, sehingga Gapoktan Mlale tetap meminjam ke bank.

Kepada Gapoktan lain, Ngadiman mengatakan, ada beberapa kendala yang perlu diantisipasi saat ingin menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Diantaranya, ketersediaan gudang penyimpanan, keterbatasan SDM manajerial, adanya aturan yang kerap berubah dan marjin dari HET pupuk yang relatif kecil.

Untuk mempersiapkan Gapoktan menjadi titik serah pupuk bersubsidi, Kepala Kelompok Subtansi, Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani, Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Dr. Acep Hariri mengatakan, pemerintah saat ini memperkuat Gapoktan sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani, termasuk bisa berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

"Jadi kita perkuat sektor bisnisnya. Selama ini unit bisnis memang masih menjadi kendala., Dari beberapa gapoktan yang menjadi kelembagaan ekonomi petani cover areanya menjadi lebih luas," tuturnya saat Sosialisasi Gapoktan sebagai Titik Serah Pupuk dan Pertanian Modern yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Selasa (22/7).

Dengan program pemerintah membentuk KDMP, Acep menilai penguatan Gapoktan mejadi lembaga ekonomi menjadi inline. Karena itu, pihaknya akan mendorong Gapoktan menjadi unit bisnis KDMP yang menangani usaha pertanian. "Jadi kelembagaan gapoktan tidak berubah. Kita kolaborasikan dengan Kopdes Merah Putih, sehingga pangsa pasar Kopdes juga makin luas," katanya.

Perbaiki Manajemen Gapoktan

Kementerian Pertanian melalui Pusluhtan BPPSDMP kini berupaya memperbaiki manajemen Gapoktan agar lebih berorientasi profesional dan mempunyai usaha berbasis klaster, sehingga arealnya lebih luas. Unit usahanya juga terintegrasi dari *on farm* hingga *off farm*.

Data Pusluhtan, saat ini sudah ada 2.049 jumlah gapoktan dan koperasi yang diusulkan menjadi titik serah pupuk bersubsidi. Dari jumlah itu baru 503 yang layak menjadi titik serah pupuk bersubsidi dan 151 tidak layak. "Keberadaan Gapoktan bukan untuk menggantikan kios pengecer yang sudah ada, tapi melengkapi keterbasan kios. Jadi kita ingin petani dekat dengan titik serah pupuk bersubsidi," tegasnya.

Sementara itu Direktur Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Jekvy Hendra juga menegaskan, keberadaan Gapoktan dan KDMP sebagai penyalur pupuk subsidi tidak akan menghilangkan peran pengecer, tapi agar petani lebih mudah mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Tidak seluruh wilayah Indonesia harus menghadirkan Gapoktan dan Kopdes Merah Putih untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Jadi jangan sampai salah paham," katanya. Hanya lanjut Jekvy, Gapoktan dan KDMP yang layak dan memenuhi peryaratan saja bisa menyalurkan pupuk bersubsidi.

Dalam prosesnya Gapoktan akan diverifikasi Dinas Pertanian, kemudian masuk dalam data Simluhtan BPPSDMP. Setelah itu diusulkan ke PT. PIHC yang akan menetapkan Gapoktan atau Badan Usaha Pertanian lain sebagai penyalur pupuk bersubsidi. "Seleksi sedang kami lakukan. Ada langkah-langkah tahapan dan evaluasi," ujarnya.

Ketua Tim Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk Ditjen PSP, Yustina menambahkan, sebelum kebijakan titik serah pupuk bersubsidi dilakukan Gapoktan secara nasional, pemerintah kini sedang mengadakan uji coba (*piloting*)**.** Ada empat lokasi yakni di Lampung Tengah (Lampung), Grobogan (Jawa Tengah), Gunung Kidul (Di Yogyakarta) dan Madiun (Jawa Timur).

Saat ini terdapat 290 Gapoktan, 29 Poktan, serta 406 Koperasi yang sudah bergabung sebagai kios/penyalur pupuk bersubsidi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMP- Pertanian telah mengusulkan 452 Gapoktan sebagai titik serah dalam usulan Tahap IV yang tersebar di 17 provinsi. Sedangkan Kementerian Koperasi telah meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih yang juga dapat menjadi titik serah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi DPR

SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT. Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman mengatakan, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini selaras dengan Rekomendasi Panja Komisi IV DPR-RI Tahun 2022. Salah satu rekemondasinya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada BUMDes, Koperasi, dan Gapoktan sebagai kios/penyalur pupuk.

"Panja merekomendasikan kepada PT Pupuk Indonesia untuk membuka 1.000-1.500 kios baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku," katanya. Sampai Juni 2025 jumlah kios pupuk sudah sebanyak 27.319 naik dari tahun 2024 yang hanya 26.914 kios.

Deni mengungkapkan, masih banyak petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Sampai Juni 2025, masih terdapat 7,62 juta petani atau 51,1% yang terdaftar e-RDKK yang belum menebus pupuk bersubsidi. Padahal jumlah petani yang tercatat di e-RDKK mencapai 14,91 juta. Sedangkan yang telah menebus 7,28 juta petani atau 49%.

Data PIHC, sampai 21 Juli penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 4,19 juta ton atau 43,9 persen dari alokasi Kementerian Pertanian sebanyak 9,55 juta ton. Karena itu ke depan, jika Gapoktan menjadi titik serah pupuk bersubsidi, maka dapat membantu memonitor dan mengajak petani penerima pupuk bersubsidi. "Kami herharap dukungan PPL dan petugas di lapangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, karena menjadi tugas bersama," katanya. **Yul**

Di Tangan Gapoktan, Pupuk Bersubsidi Lebih Tepat Sasaran

PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

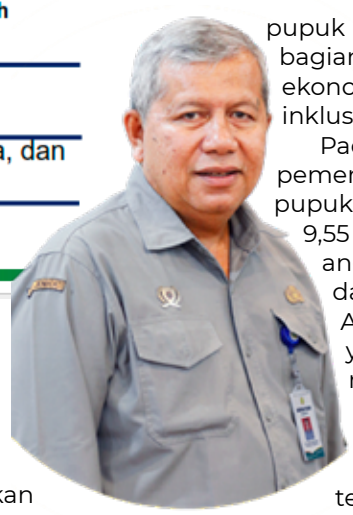
Pemerintah telah mengubah skema distribusi pupuk subsidi. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kini mendapat kesempatan untuk menjadi penyalur pupuk subsidi. Harapannya, pupuk subsidi bukan hanya memenuhi 6 Tepat (waktu, jumlah, tempat, harga, jenis dan mutu), tapi juga tepat penerima (7T).

POIN PERUBAHAN TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI

	Sebelum Perpres 06/2025	Pasca Perpres 06/2025
Sasaran	6 Tepat (waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu)	7 Tepat (waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, & **penerima**)
Penerima	Petani, LMDH tergabung Poktan	Petani, LMDH, **Pembudidaya Ikan** tergabung Poktan
Jenis Pupuk	Urea, NPK, Organik	Urea, NPK, Organik, **SP-36**, & **ZA**
Impor	Belum Diatur	**Ditetapkan pada Rakor Menko Pangan**
Penetapan Alokasi	Rakor Menko Ekon, Kepmentan, SK Gub, & SK Bup	Rakor Menko Pangan, Kepmentan, SK Kadistan Prov, & SK Kadistan Kab/Kota
Tahapan Penyaluran	BUMN Pupuk – **Distributor** – Pengecer – **Poktan**/Petani	BUMN Pupuk (**Pelaku Usaha Distribusi**) – **Titik Serah** (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi) - Petani
Verval	Kementan	Kementan dan **KKP**
Sektor	Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Pertanian (Tanaman Pangan*, Hortikultura, dan Perkebunan) dan Perikanan Budidaya

Keterangan :
- *Perpres 06/2025 diltindaklanjuti dengan Permentan 15/2025 sebagai peraturan pelaksana*
- *Tambahan komoditas ubi kayu sebagai penerima pupuk bersubsidi subsektor tanaman pangan*

kementerianpertanian kementan kementanri Kementerian Pertanian Republik Indonesia www.pertanian.go.id



Keluhan petani terhadap keberadaan pupuk subsidi ibarat lagu yang diputar setiap musim tanam. Bukan hanya terlambat sampai ke petani, tapi juga harganya yang melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ketika petani akan menebusnya.

Keluhan petani akhirnya didengar pemerintah. Tata kelola pupuk bersubsidi akhirnya dirombak besar-besara. Salah satunya jalur distribusi pupuk bisa langsung ke petani dan memberikan kesempatan Gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi atau titik serah.

Gapoktan tak lagi hanya berfungsi sebagai kelembagaan petani di tingkat desa, mereka naik kelas menjadi titik serah resmi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini tak lepas dari diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 yang mereformasi tata kelola pupuk subsidi dan terbitnya Peraturan Menteri pertanian (Permentan) No, 15 Tahun 2025.

Ketepatan Penyaluran

Direktur Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mengatakan, penempatan Gapoktan sebagai titik serah dimaksudkan untuk mempercepat dan memastikan ketepatan distribusi. “Keberadaan Gapoktan sebagai titik serah merupakan bagian dari strategi percepatan dan ketepatan penyaluran pupuk subsidi kepada petani,” ujarnya.

Namun kehadiran Gapoktan tidak serta-merta menggantikan peran pengecer, kios, maupun koperasi yang telah lebih dulu berperan sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Menurut Jekvy, mekanisme ini bertujuan memperluas akses dan menjangkau lebih banyak wilayah.

“Tidak semua daerah diwajibkan membentuk Gapoktan sebagai titik serah. Utamanya adalah bagaimana kecukupan dan kesiapan mulai dari sumber daya manusia, permodalan, hingga luasan lahan dan sarana penunjang,” tuturnya.

Kementerian Pertanian mencatat hingga pertengahan 2025, telah ada 290 Gapoktan, 29 Poktan, dan 406 koperasi yang aktif menyalurkan pupuk subsidi. Tak berhenti disitu, BPPSDMP mengusulkan tambahan 452 Gapoktan dalam tahap IV program Titik Serah, tersebar di 17 provinsi.

Dalam praktiknya, Ditjen PSP juga mensinergikan keberadaan Gapoktan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk di 80 ribu titik seluruh Indonesia. Bahkan di sejumlah lokasi, pengelola Gapoktan dan Kopdes Merah Putih adalah orang yang sama. “Strategi ini bukan tanpa alasan dengan menggabungkan sumber daya dan lokasi yang berdekatan, distribusi bisa lebih efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih peran,” katanya.

Namun, Jekvy menegaskan, tidak semua Kopdes Merah Putih serta-merta menjadikan pupuk sebagai unit usaha. Penetapan titik serah tetap memperhatikan peta sebaran pengecer, kios, dan koperasi yang telah eksis agar tidak menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Elemen Gapoktan yang ingin terlibat dalam distribusi pupuk subsidi akan mendapat dukungan penuh. Tapi sebelum terjun, kemampuan mereka akan diukur. “Karena selain menjadi titik serah, ada juga nilai usaha kegiatan yang dilakukan,” kata Jekvy.

Ia mengungkap, pihaknya sedang menjajaki skema dengan PT Pupuk Indonesia agar Kopdes Merah Putih tetap mendapatkan keuntungan usaha yang wajar. Sebab distribusi pupuk, meski berbasis subsidi, tetap harus memperhatikan kelangsungan bisnis para pelaku distribusinya.

Ujicoba di Lima Lokasi

Sementara itu Ketua Tim Kerja Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk Ditjen PSP, Yustina Retno Widiati mengatakan, saat ini pemerintah tengan melakukan uji coba titik serap pupuk bersubsidi melalui Gapoktan. Lokasinya di lima Grobogan (Jawa Tengah), Madiun (Jawa Timur), Gunung Kidul (Di Yogyakarta), Lampung Tengah (Lampung), dan Sidrap (Sulawesi Selatan).

“Lokasi itu menjadi laboratorium mini penyaluran subsidi pupuk berbasis titik serah Gapoktan,” katanya. Dalam proses ini, Ditjen PSP terus berinovasi agar kondisi lapangan bisa dipantau secara real-time. Dengan model ini, pemerintah berharap tak hanya mendistribusikan pupuk, tapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi petani.

Dengan demikian, Gapoktan bukan lagi sekadar pengelompokan administratif, melainkan motor penggerak di lapangan. Distribusi pupuk subsidi kini jadi bagian dari pembangunan ekonomi desa yang lebih inklusif dan mandiri.

Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasi pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton, dengan anggaran tak kurang dari Rp 44,15 triliun. Adapun jenis pupuk yang disalurkan meliputi urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 2.250/kg untuk urea, Rp 2.300/kg untuk NPK, Rp 3.300/kg untuk NPK formula khusus, dan Rp 800/kg untuk organik.

Sedangkan syarat penerima subsidi adalah petani dengan lahan maksimal 2 ha, terdaftar dalam e-RDKK, dan membudidayakan komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, kakao, kopi, tebu, dan ubi kayu.

Perubahan besar juga terjadi dalam skema distribusi pasca Perpres No. 6 Tahun 2025. Kini, prinsip distribusi diperluas menjadi tujuh tepat: tepat waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima. Penyaluran pupuk pun tidak lagi hanya melalui kios, tapi juga bisa lewat koperasi, Pokdakan, dan Gapoktan.

“Alur distribusinya juga lebih sederhana, namun terkoneksi dari produsen ke gudang, dilanjutkan ke pelaku usaha distribusi, kemudian ke titik serah, baik itu pengecer, koperasi, Pokdakan, maupun Gapoktan lalu ke tangan petani,” tuturnya. Penebusan pun dilakukan menggunakan KTP atau Kartu Tani, dengan transaksi tercatat di sistem e-Verval, tambah Yustina.

Melalui sinergi antara regulasi, data, dan kelembagaan, pupuk subsidi diharapkan benar-benar menyentuh akar rumput yakni petani kecil. **Gsh/Yul**

Menyiapkan Gapoktan

Jadi Titik Serah Pupuk Bersubsidi



Pemerintah mendorong transformasi Gabugan Kelompok Tani (Gapoktan) agar tak sekadar menjadi wadah petani, tapi juga aktor utama distribusi pupuk bersubsidi. Harapan pemerintah, petani nantinya benar-benar bisa menikmati pupuk bersubsidi sesuai yang telah dialokasikan, bukan hanya tepat waktunya, tapi juga tepat penerimanya.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang selama ini sebagai wadah koordinasi antar kelompok tani (Poktan), kini dapat menjadi titik serah sekaligus penyalur resmi pupuk bersubsidi. Peluang ini tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

Regulasi ini menyatakan bahwa titik serah pupuk bersubsidi bisa dilakukan Gapoktan, Pokdakan, pengecer, atau koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk. Bahkan dengan hadirnya, Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan Gapoktan menjadi bagian unit bisnis koperasi, khususnya yang menangani bidang pertanian.

"Saat ini kami memperkuat Gapoktan agar bisa berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan kami ikut mengawal bagaimana anggota Gapoktan menjadi anggota Koperasi," kata Acep Hariri, Ketua Kelompok Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani saat Sosialisasi Gapoktan Sebagai Titik Serah Pupuk yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di Jakarta, Selasa (22/7).

Potensi yang sedang digarap ini bukan sekadar wacana. Sebab data yang tercatat di Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian menunjukkan ada sekitar 64 ribu Gapoktan yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, sebelum benar-benar menjadi titik serah, mereka harus melewati sederet tahapan administratif, legal, dan teknis.

Langkah pertama, tentu saja, adalah pendaftaran dan pembaruan data di sistem Simluhtan. Gapoktan wajib melengkapi biodata kelembagaannya secara rinci, mulai dari status badan hukum, jenis usaha, ketersediaan sarana penyaluran seperti gudang dan alat transportasi, kepemilikan NPWP, hingga besaran modal yang dikelola. Semua informasi ini menjadi landasan untuk menilai kesiapan Gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi.

"Kami sedang membangun sistem di Simluhtan yang nantinya bisa dijembatani langsung dengan PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company). Ini akan mempercepat proses verifikasi dan pencocokan data," kata Acep.

Salah satu tantangan utama dalam persiapan ini adalah legalitas. Gapoktan harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi KBLI 47763, yang merujuk pada Perdagangan Eceran Khusus Pupuk dan Pestisida di Toko. NIB ini dapat diperoleh secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) di situs oss.go.id.

Langkah-langkahnya cukup jelas. Didamping penyuluh pertanian, Gapoktan atau pengurusnya bisa mendaftar akun OSS, mengisi data usaha secara lengkap, memilih klasifikasi usaha mikro, dan kemudian mengunduh NIB. Proses ini gratis, namun perlu dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, serta surat pernyataan bahwa usaha tersebut adalah milik Gapoktan. "Bisa saja atas nama Ketua Gapoktan, tapi sebaiknya disertai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa data itu adalah milik lembaga," saran Acep.

Soal fasilitas fisik juga menjadi sorotan. Acep mengakui, tidak semua Gapoktan memiliki gudang atau sarana angkut sendiri. Tapi, hal ini bukan penghalang. "Kami tidak menuntut mereka untuk membeli gudang atau truk baru. Silakan manfaatkan yang dimiliki anggota Poktan, selama ada kesepakatan bersama. Ini soal kolaborasi, bukan soal kepemilikan tunggal," ujarnya.

Soal permodalan memang menjadi kendala utama bagi Gapoktan yang ingin terjun menjadi penyalur pupuk subsidi. Sesuai regulasi, Gapoktan harus memiliki skala usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal awal bisa dihimpun melalui urunan anggota atau kerja sama dengan lembaga keuangan.

"Di sinilah peran penyuluh menjadi vital, bukan hanya sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai penggerak kapasitas kelembagaan," katanya. Karena itu, pendampingan oleh penyuluh dalam meningkatkan kesiapan Gapoktan menjadi titik serah pupuk bersubsidi menjadi sangat penting.

Mulai dari edukasi mengenai manfaat menjadi titik serah, pelatihan pengelolaan stok pupuk, pencatatan transaksi, hingga akses ke lembaga pembiayaan. Dengan adanya pendampingan dari penyuluh, Acep berharap akan ada perbaikan manajemen usaha tani dan Gapoktan akan lebih profesional dan mempunyai skala berbasis klaster. "Dengan adanya klaster cover area lebih luas. Jadi tidak sebatas desa, bahkan bisa lintas kecamatan dan mengelola satu komoditas," katanya.

Tak Gantikan Kios

Meski nanti Gapoktan bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan ekonomi petani dan menjadi titik serah pupuk bersubsidi, Acep menegaskan, bukan berarti sepenuhnya menggantikan peran kios resmi yang sudah ada. Gapoktan hanya melengkapi keterbatasan yang selama ini dirasakan di lapangan, khususnya dalam penyaluran pupuk subsidi ke petani.

"Kios pengecer tetap eksis. Tidak ada penghapusan. Yang kami lakukan adalah memperluas titik serah distribusi pupuk subsidi dengan menambahkan aktor-aktor seperti Gapoktan, koperasi, dan Pokdakan," katanya.

Satu harapan pemerintah ketika Gapoktan menjadi titik serah pupuk bersubsidi adalah petani semakin dengan sumber penyediaan pupuk bersubsidi. Namun demikian, meski titik serah ditambah, bukan berarti semua Gapoktan dan koperasi bisa langsung menyalurkan pupuk subsidi, ada proses verifikasi dan validasi yang harus dilalui.

Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota akan melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian penilaian ini mencakup kesiapan kelembagaan, ketersediaan sarana, hingga kapasitas sumber daya manusia. Bila lolos, usulan akan dikirim ke BPPSDMP untuk evaluasi lanjutan. Setelah itu, Gapoktan dapat mendaftarkan diri ke distributor pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Akhir dari rangkaian ini adalah pengajuan resmi ke PIHC, yang membuka jalan bagi Gapoktan menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi. Jika berhasil, bukan hanya petani yang diuntungkan, tapi juga ekosistem pertanian desa secara keseluruhan. Peran Gapoktan akan naik kelas, dari sekadar wadah koordinasi menjadi pemain aktif dalam tata niaga saprodi.

"Kami tidak menargetkan semua Gapoktan harus jadi penyalur pupuk bersubsidi. Tapi bagi yang siap, kami akan dampingi. Ini bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas dan komitmen kelembagaan petani," kata Acep Hariri dengan nada penuh harap. **Gsh/Yul**

Pupuk Indonesia Pastikan SDM dan Sistem Siap





Transformasi tata kelola pupuk bersubsidi terus digulirkan PT Pupuk Indonesia (Persero). Tahun ini, perusahaan pelat merah itu mulai mengimplementasikan regulasi terbaru Peraturan Presiden No 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 dengan mengakselerasi peran Gapoktan sebagai titik serah dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

SPV Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Deni Dwiguna Sulaeman, pihaknya terus berkomitmen memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan optimal sesuai dengan amanat pemerintah. Hingga 21 Juli 2025, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,19 juta ton atau 43,9% dari total alokasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian.

”Capaian ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih di bawah 50%,” kata Deni saat Sosialisasi Gapoktan sebagai Titik Serah Pupuk Bersubsidi dan Pertanian Modern yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Selasa (22/7).

Kondisi penyaluran yang belum mencapai setengah dari alokasi tersebut menurut Deni menjadi perhatian serius. Karena itu, diperlukan upaya bersama di lapangan agar pupuk bersubsidi yang dialokasikan benar-benar diterima petani.

Secara nasional, Deni mengungkapkan, ketersediaan stok pupuk berada dalam kondisi aman. Saat ini stok urea mencapai 618.270 ton dan NPK sebanyak 630.380 ton. Jumlah tersebut, cukup untuk memenuhi kebutuhan dua bulan ke depan. Produksi juga terus dilakukan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia demi menjaga ketersediaan pasokan.

Buka Kesempatan Gapoktan

Dalam rangka mendukung tata kelola pupuk subsidi sesuai regulasi terbaru, Pupuk Indonesia membuka kesempatan luas bagi koperasi, dan Gapoktan untuk berperan aktif sebagai kios atau penyalur pupuk bersubsidi. Dalam dua tahun terakhir, Pupuk Indonesia terus mendorong penambahan titik serah baru agar petani semakin mudah mengakses pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Juli 2025, jumlah pengecer atau kios meningkat dari 26.164 pada 2023 menjadi 27.319 di 2025, termasuk tambahan dari Gapoktan yang siap ditetapkan sebagai titik serah. ”Kami sudah mendapatkan usulan titik serah pupuk bersubsidi dari Pusat Penyuluh Pertanian,” ujarnya.

Pada tahap I ada 10 usulan koperasi berdasarkan SIMLUHTAN (Sistem Penyuluh Pertanian) per 20 Februari 2025. Dari ususlan tersebut 7 koperasi dinyatakan layak sebagai calon penyalur, 4 koperasi dinyatakan ditunjuk sebagai calon penyalur.

Kemudian pada tahap II ada 142 Gapoktan yang siap sebagai penyalur, 80 Gapoktan dinyatakan layak sebagai calon penyalur. Pada tahap III ada 214 Gapoktan yang siap sebagai penyalur, dari sana 129 Gapoktan dinyatakan layak sebagai calon penyalur. Dengan demikian dari tahap II dan III, total ada 209 Gapoktan dinyatakan layak sebagai calon penyalur. Namun hanya 132 gapoktan yang ditunjuk sebagai calon penyalur, sedangkan 77 Gapoktan tidak ditunjuk sebagai calon penyalur.

Sedangkan pada tahap IV ada 481 Gapoktan yang siap sebagai penyalur dan tahap V ada 1.165 Gapoktan yang siap sebagai penyalur. “Saat ini sedang berjalan verifikasi kesiapan Gapoktan menjadi titik serah tahap IV dan tahap V oleh Tim Penjualan Wilayah PT Pupuk Indonesia,” tambahnya.

Gapoktan Pantau Penebusan Pupuk

Deni berharap titik serah tidak hanya berperan menyalurkan pupuk, tetapi juga memonitor realisasi penebusan oleh petani. Hal tersebut tidak lepas dari realisasi penebusan pupuk bersubsidi baru mencapai 43,9% dari alokasi nasional, yakni 4,19 juta ton hingga 21 Juli 2025. Sementara masih ada 51,1% petani terdaftar dalam e-RDKK yang belum melakukan penebusan, jumlahnya mencapai 7,62 juta petani.

“Ke depan, Gapoktan sebagai titik serah harus lebih proaktif memonitor aktivitas penebusan petani di wilayahnya, memastikan pupuk subsidi sampai kepada petani,” tegasnya. Karena itu, dengan menggunakan aplikasi i-Pubers dalam penyaluran pupuk subsidi yang akan dipakai Gapoktan, diperlukan SDM yang mumpuni.

Sadar bahwa tidak semua Gapoktan terbiasa dengan digitalisasi, Pupuk Indonesia mengajak penyuluh pertanian berperan aktif dan intens mendampingi Gapoktan dalam pengelolaan administrasi, alokasi pupuk, hingga penggunaan aplikasi. “Kami berharap Gapoktan sebagai titik serah tidak hanya menjadi penyalur, tapi benar-benar proaktif, responsif, paham administrasi, serta kompeten dalam mengoperasikan sistem digital. Ini target kami,” ujar Deni.

Untuk memastikan kesiapan lapangan, PT Pupuk Indonesia telah melakukan uji coba sistem baru di lima kabupaten yang ada di lima provinsi, yakni Lampung Tengah, Madiun, Sidenreng Rappang, Gunung Kidul, dan Grobogan. “Hasilnya cukup melegakan atas pelaksanaan pada pilot project di 2 kabupaten awal, kami siap men-*scale up* wilayah *pilot project* yang sebelumnya ditetapkan dalam Rapat Pokja untuk lima wilayah kabupaten menjadi implementasi secara nasional,” tuturnya.

Salah satu prioritas ke depan adalah menghitung ulang jumlah titik serah ideal per wilayah. Saat ini satu titik serah rata-rata meng-cover tiga desa, namun Pupuk Indonesia mempertimbangkan agar jarak semakin dekat agar penebusan pupuk bersubsidi menjadi lebih praktis bagi petani.

“Kami juga membuka ruang evaluasi bersama penyuluh pertanian untuk menyesuaikan titik serah sesuai aspek keekonomian, jarak, serta kepadatan petani di wilayah masing-masing,” ujar Deni.

Sinergi antara Gapoktan, koperasi, penyuluh, dan pengecer eksisting juga menjadi fokus. Jangan sampai perubahan tata kelola justru menimbulkan rebutan alokasi. Untuk itu, perlu kolaborasi kuat yang dimediasi penyuluh yang mempunyai data lapangan lebih detail, sehingga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke titik serah, sesuai regulasi terbaru. “Tugas kami adalah memastikan stok aman, penyaluran lancar, dan data akurat. Gapoktan sebagai titik serah adalah mitra kunci dalam transformasi layanan pupuk subsidi agar lebih dekat, tepat sasaran dan akuntabel,” tegasnya.

Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, transformasi sistem distribusi pupuk bersubsidi diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Herman/Yul

Jurus Pemerintah Tahan Laju Harga Beras



Harga beras dalam beberapa pekan terakhir bergerak naik, meski pemerintah menyatakan produksi padi meningkat dan stok beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton. Kenaikan harga beras tersebut mendorong pemerintah menggelar operasi pasar besar-besaran.

Operasi pasar dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berlangsung serentak di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia. Bahkan jumlah yang pemerintah siap gelontorkan bisa bikin ciut pelaku usaha perberasan swasta yakni hingga 1,3 juta ton hingga akhir tahun 2025 mendatang.

Harganya pun cukup menarik. Masyarakat dapat memperoleh beras SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), pemerintah menetapkan Rp 12.500/kg atau Rp 62.500 (kemasan 5 kg). Zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel; NTT dan Kalimantan) Rp 13.100/kg, kemudian untuk zona 3 (Maluku, Papua) Rp 13.500/kg.

Saat peluncuran GPM SPHP berlangsung di Kantor Pos Besar Fatmawati, Jumat (18/7), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan, untuk membantu menstabilkan harga beras yang sedang naik, pemerintah telah memerintahkan Bulog melakukan operasi pasar dengan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton.

"Bulog melakukan operasi pasar karena ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu menstabilkan harga yang sedang naik," ujarnya. Ke depan, pemerintah mendorong Koperasi Desa Merah Putih untuk menjaga stabilisasi harga beras.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menambahkan, GPM SPHP kali ini merupakan operasi pasar besar-besaran untuk mengantisipasi agar harga beras tidak naik ketika stok melimpah. Berdasarkan hasil Rakortas, Pemerintah akan menyalurkan 360.000 ton per bulan untuk bantuan pangan dan 1,3 juta ton untuk SPHP, sehingga total lebih dari 1,5 juta ton digerakkan secara nasional.

"Hari ini kita operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak. Kami yakin dalam 1–2 minggu ke depan, harga akan turun," ujarnya.

Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company. Karena itu, Amran berharap dengan menggandeng seluruh pihak dalam operasi pasar ini bisa digerakkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian masyarakat menikmati harga yang baik di saat produksi meningkat.

Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran. Mekanismenya telah disiapkan dengan baik oleh BULOG agar tidak terjadi penjualan di atas HET. "Semuanya mengacu pada aturan dan juknis dari Badan Pangan Nasional," katanya.

Karena itu, dalam penyaluran beras SPHP pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sebagai upaya memperluas jangkauan distribusi, Perum BULOG menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini bertujuan memastikan beras SPHP dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Program SPHP merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan. "BULOG berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya secara merata," ujarnya.

Perketat Saluran SPHP

Demi ketepatan sasaran, Ia menegaskan, Bulog memperketat saluran distribusi SPHP melalui beberapa jalur distribusi utama, yaitu pengecer pasar, Koperasi Desa Merah Putih, Kios Pangan binaan Pemda dan kegiatan GPM oleh instansi pemerintah, termasuk TNI. "Semua saluran ini diwajibkan menggunakan aplikasi Klik SPHP, dari mulai daftar hingga pemasarannya. Jadi semua terverifikasi usahanya," ujarnya.

Bahkan menurut Rizal, verifikasi juga akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah untuk mengetahui kelayakan usaha. Setelah verifikasi, saluran pengecer tersebut baru bisa memesan beras SPHP dengan volume maksimal 2 ton sekali pesanan. "Setelah beras tersebut sampai di pengecer, pihak Bulog akan memverifikasi kembali," katanya.

Langkah selanjutnya, tiap pengecer atau pihak yang menyalurkan wajib membuat surat pernyataan tidak menyelewengkan beras SPHP. Pertama, menyediakan sarana informasi dengan mencantumkan nama toko, alamat, harga jual, kemasan dan layanan pengaduan konsumen, serta melaporkan transaksi dalam aplikasi Klik SPHP.

Kedua, menjual beras di tingkat eceran paling tinggi sesuai HET di wilayahnya yang sesuai ketentuan Kepala Badan Pangan Nasional. Ketiga, tidak membuka kemasan dan melakukan pencampuran atau mengoplos beras SPHP dengan beras lainnya. Keempat, sanggup menjual beras SPHP kepada konsumen akhir maksimal 2 kemasan ukuran 5 kg dan tidak untuk dijual lagi.

Point lain yang sangat penting adalah aturan sanksi pidana bagi pelanggar. Sesuai dengan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagi pelanggar akan terkena sanksi pidana dengan ancaman penjaran 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 1 Tahun 2012 tentang Pangan, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

"Jadi semua kita protect, supaya oknum yang nakal sudah kita antisipasi. Bahkan kami juga melibatkan Satgas Pangan, Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Pasar, serta Satpol PP untuk mengawasi pergerakan beras SPHP ini," tuturnya.

Jika masyarakat ingin mengadukan persoalan penyaluran beras SPHP, Rizal menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan Hot Line. Bahkan, pihak Bulog akan melakukan respon cepat terhadap pengaduan tersebut.

"Kami juga telah meminta agar pengecer wajib menyiapkan timbangan untuk mengukur ditempat berat beras yang dibeli konsumen. Jadi timbang di tempat. Jika beratnya kurang, konsumen boleh langsung menukar," tegasnya. Melalui kegiatan ini, Rizal berharap masyarakat dapat memperoleh akses pangan pokok dengan harga terjangkau. **Yul**

Bantuan Pangan, Asa di Tengah Himpitan Ekonomi



Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan. Bantuan beras sebanyak 20 kg yang diberikan untuk alokasi 2 bulan (Juni-Juli) menjadi asa penyambung hidup bagi masyarakat miskin.



Senyum mengembang dari Heri, warga yang tinggal di Bantaran Sungai Ciliwung, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Baginya bantuan beras sebanyak 20 kg menjadi harapan di tengah sulitnya ekonomi. Apalagi dirinya baru pertama kali mendapatkan bantuan beras dari pemerintah.

"Saya mah ingin lanjut terus. Tahun lalu saya tidak dapat bantuan ini," katanya saat Tabloid Sinar Tani bertemu di rumahnya. Bukan hanya Heri, `Ibu Sumiyati dan Ibu Darmi, serta masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan juga merasakan hal yang sama. Bagi mereka bantuan beras sebanyak 20 kg selama dua bulan cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Lurah Tanjung Barat, Rizki Wijaya mengatakan, penerima bantuan tersebut berasal dari usulan dari bawah yakni tingkat RT dan mereka sudah terverifikasi benar-benar berhak atas bantuan pangan tersebut. Di Kelurahan Tanjung Barat, ada sekitar 855 penerima bantuan pangan sebanyak 10 kg/bulan. "Di Kelurahan Tanjung Barat saya memang ada penurunan jumlah penerima. Mudah-mudah penerima adalah mereka yang benar-benar berhak," katanya berharap.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jakarta-Banten, Rizki Puspitasari mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan pangan (beras) kepada masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Untuk wilayah Jakarta ada sebanyak 218.921 KPM (keluarga penerima manfaat) dengan alokasi 10 kg perbulan.

Data Kanwil Bulog Jakarta-Banten, wilayah Jakarta Barat sebanyak 54.545 KPM, Jakarta Pusat 33.240 KPM, Jakarta Selatan 36.590 KPM, Jakarta Utara 48.418 KPM dan Kepulauan Seribu 1.848 KPM. "Seluruh Jakarta mencapai 218 ribu penerima bantuan pangan, sehingga total yang akan kita salurkan sebanyak 4 ribu ton lebih untuk alokasi 2 bulan Juni dan Juli," kata Rizky.

Saat pemberian bantuan pangan di bantaran Sungai Ciliwung, Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis (17/7), Rizky mengatakan, penerima bantuan pangan tersebut sudah melalui verifikasi di Kementerian Sosial bahwa orang atau keluarga penerima manfaat wajar penerima bantuan pemerintah tersebut. Namun secara umum adalah warga atau masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah.

"Jadi kami mendapatkan data dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial yang kemudian diturunkan ke Badan Pangan Nasional, selanjutnya diberikan ke Bulog untuk menyalurkan bantuan ke penerima manfaat," katanya.

Dikatakan, titik bagi bantuan pangan ini adalah di kelurahan dan balai desa atau lokasi yang terdekat dan mudah dijangkau masyarakat. Untuk memastikan bantuan pangan tersebut tidak salah sasaran, penerima akan diverifikasi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. "Karena sesuai data DTSEN, inshaa Allah penyaluran akan tepat sasaran," ujarnya.

Monitoring Penyaluran

Bagaimana mengawasi bantuan pangan agar tidak salah sasaran? Rizky menegaskan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pada saat penyaluran dan pasca penyaluran. "Saat evaluasi kami melibatkan instansi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan berkolaborasi dengan TNI dalam hal ini Babinsa yang standby dalam pelaksanaan penyaluran," tuturnya.

Bahkan lanjut Rizky, pihaknya juga sudah menyiapkan data pengganti jika ada calon penerima berpindah tempat tinggal. Namun demikian, penerima bantuan pangan tidak bisa dipindahtangankan ke orang lain. "Jadi sudah terdata secara sistem, sehingga tidak bisa pindah tangan. Tapi kita ada mekanisme PBP pengganti, sistem sudah mengakomodir, termasuk dalam kondisi tertentu seperti meninggal," katanya.

Sementara jika ada penerima bantuan pindah tempat tinggal, Rizky dapat diganti dengan cadangan yang sudah terdata di data DTSEN. "Warga yang pindah tempat tinggal tersebut sudah tidak lagi mendapat alokasi bantuan di lokasi tempat tinggal semula," ujarnya.

Perum BULOG memastikan kesiapan penuh dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Penyaluran ini dilakukan setelah terbitnya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 perihal Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 pada 4 Juli 2025.

Bantuan pangan ini merupakan bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 yang digagas pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menekan inflasi pangan, khususnya beras. Penyaluran bantuan pangan dilaksanakan berdasarkan data PBP yang telah ditetapkan oleh Bapanas melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Distribusi Banpang dilakukan secara one shoot atau satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni bulan Juni dan Juli 2025. Setiap PBP akan menerima 10 kg beras per bulan, dengan total 20 kg per penerima. "Kami telah menerima penugasan resmi dari Bapanas, dan seluruh lini distribusi BULOG siap bergerak. Kami memastikan kualitas beras yang disalurkan adalah beras terbaik dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selama ini kami jaga," ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto.

Perum BULOG telah mempersiapkan distribusi bantuan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan stok CBP di gudang seluruh Indonesia, armada logistik yang memadai, hingga sistem distribusi berbasis teknologi informasi untuk pemantauan real-time. Untuk perlindungan sosial, Suyamto menegaskan, pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Bapanas, Kemensos, dan pemerintah daerah.

Proses distribusi dirancang untuk berjalan secara efisien dan akuntabel, dengan mengutamakan ketepatan jumlah, lokasi, dan waktu penerimaan bantuan. "BULOG berkomitmen menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan sinergi. Kami akan terus mendukung pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial serta menjaga akses pangan masyarakat," tambah Suyamto. **Yul**

Okta, sang Kreator Fried Chicken Almaz

Di tengah guritas bisnis ayam goreng siap saji (fried chicken) dari brand Negeri Paman Sam, Almaz Fried Chicken menyalip dengan menyajikan kekhasan Ayam Goreng Saudi. Dengan cita rasa yang berbeda, ayam goreng Almaz menjadi alternatif pilihan bagi konsumen.



Bagi masyarakat menikmat ayam siap saji, kini makin banyak pilihan. Kehadiran Almaz Fried Chicken memberikan alternatif kuliner yang wajib dicoba. Bahkan kini telah hadir hampir di seluruh Nusantara.

Siapa dibalik suksesnya Ayam Goreng Almaz? Ia adalah Okta Wirawan. Alumni Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB tahun 2000-2004 mulai menekuni bisnis kecil-kecilan semasa kuliah. Pengalaman ini menjadi fondasi kuat untuk langkah-langkah besar yang ia tempuh kemudian.

Lahir di Bogor pada 18 Juli 1982, namun besar di Padang menjadikan dirinya tertular ilmu dagang dari kota yang memang terkenal dengan jiwa bisnisnya itu. Di tengah lingkungan kampung ondeh-ondeh, ia terbiasa menyaksikan anak-anak berjualan jajanan sejak pagi.

"Dari kecil saya sering menemani teman-teman jualan ondeh-ondeh. Dari situ saya belajar konsep dagang, bagaimana berjualan, dan memahami interaksi dengan pelanggan," ujarnya dikutip dari laman alumniipbpedia. Dari kebiasaan inilah Okta belajar konsep jual beli dan mengenal lebih awal interaksi dengan pelanggan.

Sebelum terjun penuh sebagai pengusaha, Okta mengawali kariernya di sektor retail modern. Ia bergabung dengan PT Carrefour Indonesia sejak 2005 dan menapaki berbagai posisi strategis, dari Assistant Sales Manager hingga Senior Procurement Manager.

Tahun 2013 hingga 2018 menjadi fase penting dalam kariernya di PT Mega Mahadana Hadiya (Mahadya Group), induk dari berbagai brand makanan seperti Wing Stop. Peran strategisnya sebagai Head of Operations semakin mematangkan kemampuan manajerial dan operasional yang kelak sangat berguna dalam membangun bisnisnya sendiri.

Tahun 2017, Okta mendirikan PT Abuya Berkah Indonesia Makmur (ABINDO), yang memayungi berbagai brand kuliner berbasis masakan Nusantara. Dimulai dari Kedai Abuya dengan konsep “Serba Murah, Sebar Berkah”, bisnis ini berkembang pesat. “Beberapa brand telah kami kembangkan di 5 tahun terakhir. Salah satunya Brand Kebuli Abuya. kami berharap kehadiran kami bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak, investor, supplier, karyawan, pelanggan dan pemerintah,” katanya.

Setelah sukses dengan Ayam Kebuli Abuya, Okta kemudian mengembangkan usahanya yakni Almaz Fried Chicken. Central Kitchen yang dikelola ABINDO menjadi dapur utama yang melahirkan berbagai brand dan produk terkenal. Bahkan Almaz Fried Chicken menjadi brand terbaru yang fenomenal di Indonesia.

Didirikan Okta Wirawan pada 14 Juni 2024, Almaz Fried Chicken kini telah membuka lebih dari 70 cabang hanya dalam waktu tujuh bulan. Berawal dari Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, brand ayam tersebut kini sudah tersebar lebih dari 200 cabang di seluruh Indonesia.

Dengan menggunakan tagline Ayam Goreng Saudi No.1 di Indonesia! PT. Abindo menjadi salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverages dengan mengembangkan brand restoran hidangan khas Timur Tengah seperti Nasi Kebuli Abuya dan Almaz Fried Chicken.

Konsep ayam goreng halal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati ayam goreng tanpa kekhawatiran akan afiliasi produk dengan entitas pendukung genosida. Brand ini mengusung misi sosial yang kuat. Setiap pembelian turut menyumbang 5 persen keuntungan untuk Palestina.

Selain itu, Okta menargetkan pembagian 100.000 nasi boks gratis per hari, serta membuka hingga 5.000 cabang sebagai infrastruktur rezeki. “Melalui jaringan bisnisnya, saya berharap dapat membangun masjid, pesantren, dan menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan,” kata Okta.



Dipersulit Oknum

Di balik laju ekspansi yang luar biasa, Okta juga menghadapi hambatan. Dalam proses pengurusan sertifikasi halal untuk Almaz Fried Chicken, ia sempat ditagih biaya yang tidak masuk akal oleh oknum, termasuk biaya audit dan pendampingan yang mencapai miliaran rupiah.

Pengalaman ini mendorongnya untuk mengadvokasi keadilan dan transparansi dalam sistem sertifikasi halal, hingga akhirnya bertemu langsung dengan Kepala BPJPH untuk mendapatkan kejelasan proses resmi yang seharusnya mudah dan murah.

Tak hanya PT ABINDO, pada tahun 2023 Okta mendirikan dua perusahaan lain: PT Abuya Bahagia Sejahtera yang menaungi Rumah Sehat Bekam Alami dan PT Sora Abuya Sejahtera yang fokus pada bisnis alat tulis Sora Stationary. Ia juga menjadi Co-Founder TukangSayur.ID, platform digital untuk distribusi produk segar.

Dengan semangat berbagi pengalaman, Okta aktif membagikan kisah-kisah jatuh bangun bisnisnya melalui akun Instagram @oktawirawan. Ia percaya bahwa keberhasilan bukan sekadar tentang untung besar, tetapi bagaimana usaha menjadi berkah, memberikan manfaat, dan memperkuat nilai-nilai umat.

Baginya, menjadi pengusaha bukan tentang hidup enak setiap waktu. Ia pernah menjalani empat tahun berturut-turut merayakan Idulfitri dalam kondisi pas-pasan. Pengalaman inilah yang menempanya menjadi pribadi tangguh. "Kalau orang bilang jatuh bangun, saya lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya," ujarnya sambil tertawa dalam salah satu podcast.

Okta Wirawan tidak hanya membangun bisnis, ia membangun nilai. Dengan menjadikan setiap cabang sebagai jalan keberkahan, ia mengubah visi berbisnis dari sekadar mencari profit menjadi wujud kontribusi nyata untuk masyarakat dan umat. Dari semangat kampung ondeh-ondeh hingga membangun ribuan cabang, langkah-langkahnya menjadi inspirasi bahwa bisnis dan nilai bisa berjalan beriringan. **Yul**

Urgensi Cetak Sawah Saat ini

Oleh: Rizky Purwantoro
Staf Tim Humas & Hukum Ditjen Lahan & Irigasi Pertanian

Kebijakan pengembangan pertanian nasional sejak kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini lebih difokuskan pada terwujudnya peningkatan produksi pangan dan ketersediaan stok pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

Kementerian Pertanian didukung oleh stakeholders dan Kementerian/ Lembaga lain terkait memiliki tanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut diharapkan berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau.

Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, institusional dan tata kelola pembangunan.

Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multi fungsi.

Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan di segala bidang di Indonesia, terutama pada sektor industri, salah satunya dengan bertambahnya pabrik dan pergudangan di beberapa daerah dan juga semakin banyaknya pemukiman di lokasi-lokasi yang sebelumnya merupakan lumbung padi ternyata sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, penyebabnya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Hal tersebut akan berimplikasi serius karena mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional untuk jangka waktu ke depannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting.

Jadi jika skenarionya tanpa terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah saja yang dibarengi dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat saja sangat membahayakan untuk terjadinya kerawanan pangan, apalagi dengan terjadinya alih fungsi lahan yang semakin banyak di lokasi-lokasi yang tadinya menjadi lumbung padi, maka akibatnya akan jauh lebih mengerikan.

Risiko paling kecil adalah kenyataan getir bahwa negeri ini masih bergantung pada impor bahan pangan dari luar. Ketergantungan semacam ini bukan sekadar soal logistik atau angka di neraca perdagangan, melainkan cerminan dari ketidakmampuan kita dalam mencukupi kebutuhan makan rakyat dengan tangan sendiri. Dan ketika sebuah negara menyerahkan perut rakyatnya pada hasil bumi negara lain, maka harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal dari sekadar uang.

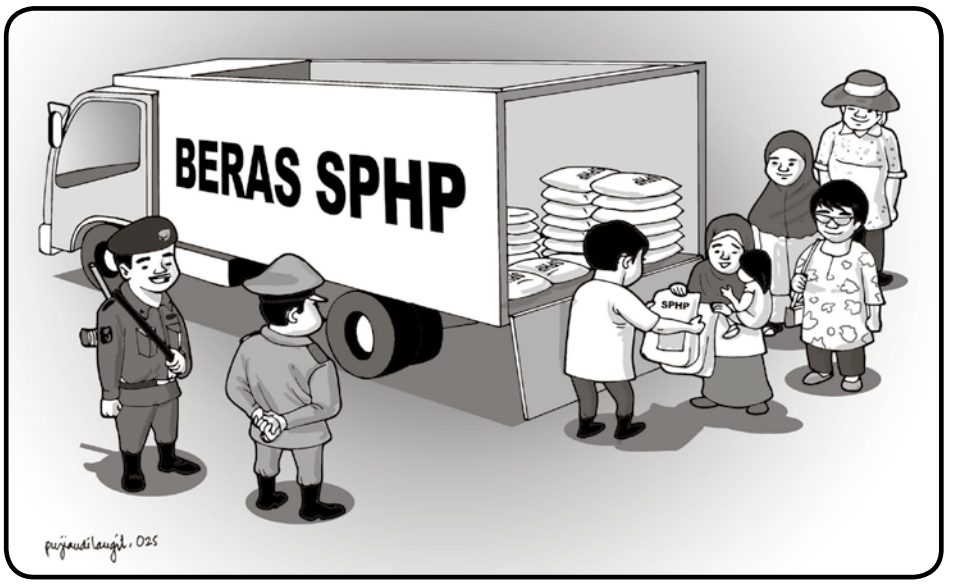
Dan ketika dunia dihantam badai, seperti saat pandemi COVID-19 melanda, di mana negara-negara penghasil mulai menutup kran ekspor demi mengamankan stok dalam negeri, kita yang terbiasa bergantung pun limbung. Ketahanan yang semu akhirnya runtuh, menyisakan pelajaran pahit: bahwa ketergantungan adalah kelemahan, apalagi dalam urusan makan.

Itu baru membicarakan risiko terkecil, belum membicarakan risiko besar, seperti dapat terjadinya kelaparan atau kekurangan gizi akut di generasi berikutnya karena kekurangan makanan bergizi yang dapat disediakan negara.

Oleh karena perlu adanya perluasan lahan baku sawah yang dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penambahan luas baku lahan sawah, salah satunya dapat dilaksanakan melalui kegiatan cetak sawah sebagai terobosan peningkatan produksi pangan serta stok cadangan pangan Nasional.

Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP-CL), survey dan investigasi CP-CL, Desain, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah dan pemanfaatannya.



Gapoktan Jadi Titik Serah Pupuk Subsidi

Kolom



Oleh: **Memed Gunawan**

Penyaluran pupuk subsidi langsung kepedesaan sudah ditetapkan menggantikan pola yang sebelumnya melalui lini 1 sampai dengan 4. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) ditunjuk menjadi salah satu titik serah selain Koperasi dan kios. Sejauh mana Gapoktan siap untuk melaksanakan kerja besar ini? Kelompok Tani maupun Gapoktan sampai saat ini bukanlah entitas bisnis.

Sebenarnya banyak dampak positif jika Gapoktan mampu berperan sebagai Titik Serah Pupuk Subsidi. Dari segi aksesibilitas, Gapoktan berada dekat dengan petani, sehingga distribusi menjadi lebih cepat dan efisien. Pemetaan kebutuhan juga lebih akurat karena Gapoktan mengetahui kebutuhan riil petani anggotanya berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman. Peningkatan peran Gapoktan juga sekaligus merupakan proses penguatan Kelembagaan Tani, menambah peran dan posisi tawar Gapoktan dalam tata kelola pertanian lokal, mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Pengawasan sosial, kontrol distribusi juga bisa lebih transparan karena memungkinkan pengawasan horizontal oleh sesama petani.

Yang harus diantisipasi adalah bagaimana menangani masalah yang mungkin timbul. Kapasitas manajemen Gapoktan belum merata. Gapoktan belum memiliki manajemen administrasi, logistik, dan keuangan yang memadai. Gapoktan tidak memiliki kesiapan logistik seperti gudang atau armada angkut yang memadai. Selain itu ada keterbatasan SDM dan sistem, tidak semua Gapoktan mampu menjalankan pencatatan digital atau mengikuti regulasi ketat.

Melihat kondisi Gapoktan secara umum, penentuan Gapoktan oleh Pupuk Indonesia dilakukan sangat ketat sehingga sampai sekarang baru sedikit yang sudah terpilih sebagai titik serah pupuk bersubsidi. Hanya Gapoktan yang memenuhi syarat administratif, SDM, dan logistik yang dijadikan titik distribusi. Pendampingan dan pelatihan terstruktur pengurus Gapoktan dalam manajemen distribusi, pencatatan digital, dan akuntabilitas wajib dilakukan. Sistem Digitalisasi Transparan, penggunaan aplikasi atau sistem e-RDKK yang terintegrasi harus diterapkan untuk memantau distribusi dan alokasi pupuk.

Pupuk tidak saja harus segera sampai pada petani karena kebutuhannya untuk tanaman tidak bisa menunggu, tetapi proses distribusinya juga harus efisien. Gapoktan, koperasi atau pengecer harus memenuhi skala ekonomi tertentu sehingga menguntungkan dan bisa berperan berkelanjutan. Jadi kolaborasi antara Gapoktan, koperasi dan pengecer harus dijadikan pertimbangan agar skala usaha ini bisa terwujud. Proses ini tentu saja memerlukan pendataan yang baik dan penyempurnaan yang terus menerus.

Mekanisme Pengaduan Terbuka, dengan menyediakan jalur pengaduan petani untuk mencegah dan menindak penyimpangan harus dibangun. Kerja Sama dengan Penyuluh dan Pemerintah Desa untuk mendampingi dan mengawasi pelaksanaan distribusi. Demikian juga Evaluasi Berkala dan Rotasi harus jadi bagian kegiatan, karena evaluasi performa Gapoktan secara berkala mutlak diperlukan.

Menjadikan Gapoktan sebagai titik distribusi pupuk subsidi adalah peluang memperkuat kelembagaan petani, namun perlu dukungan kapasitas dan pengawasan ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru. Pendekatan bertahap dan selektif, berbasis transparansi dan pemberdayaan, merupakan langkah terbaik. Jangan sampai Gapoktan tergagap-gagap.

Kementan Dorong Investasi Peternakan, **Garut Bersiap Jadi Sentra Sapi Perah**

Investasi di sektor peternakan kembali menggeliat. Kali ini, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menggandeng PT Farm Fresh Nusantara untuk mengembangkan kawasan peternakan sapi perah terintegrasi di Cisaruni, Garut, Jawa Barat.



Di atas lahan seluas 237 hektare, kolaborasi strategis ini menargetkan peningkatan produksi susu segar dalam negeri sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Bersyarat yang ditandatangani kedua belah pihak. Proyek ini tidak hanya membawa semangat kolaborasi, tetapi juga menandai komitmen investasi jangka panjang dalam sektor peternakan nasional.

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyebutkan, kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi aset negara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis peternakan modern.

"Ini adalah model investasi yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam menyediakan kebutuhan susu bagi masyarakat. Kami optimistis kawasan peternakan terintegrasi ini bisa memberi dampak ekonomi yang luas," ujar Teddy.

Dukungan penuh juga datang dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), yang memfasilitasi proses kemitraan tersebut. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menegaskan pentingnya investasi di sektor peternakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan penguatan gizi masyarakat.



"Kami terus mendorong kerja sama seperti ini sebagai bagian dari upaya mempercepat populasi sapi perah nasional dan mendukung industri susu dalam negeri," ungkap Agung.

Dari sisi investor, PT Farm Fresh Nusantara berkomitmen menghadirkan investasi nyata. Direktur PT Farm Fresh Nusantara, Ilyas Pratama Putra, menargetkan populasi sapi perah di kawasan Cisaruni mencapai 3.000 ekor pada tahun pertama.

"Kami tidak sekadar berinvestasi, kami membangun ekosistem peternakan modern yang berkelanjutan, dari hulu hingga hilir. Investasi ini juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar," kata Ilyas.

Proyek peternakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat industri susu lokal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, mengurangi ketergantungan impor, serta membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh.

Kementerian Pertanian menargetkan, model investasi serupa bisa diperluas ke wilayah lain untuk membangun ekosistem peternakan sapi perah nasional yang berdaya saing.**Ditjen PKH**

GELIAT **MILENIAL**

Lalab Project, Cara Aisyah Kenalkan Sayur Lokal ke Gen Z

Lewat Lalab Project, Siti Aisyah Novitri mengajak Gen Z kenal lebih dekat dengan aneka lalapan khas Nusantara demi lestarinya pangan lokal.



Di tengah arus deras makanan cepat saji dan tren makanan kekinian yang membanjiri media sosial, seorang mojang Priangan bernama Siti Aisyah Novitri justru memilih jalur sebaliknya. Ia memperkenalkan kembali kekayaan sayuran lokal Indonesia kepada generasi muda lewat program edukasi yang ia beri nama Lalab Project.

Lulusan Jurusan Sastra Inggris Universitas Pendidikan Indonesia ini tak sekadar bertani. Sejak 2023, ia menekuni usaha hortikultura secara serius, membudidayakan berbagai sayur seperti paprika, timun jepang, dan selada di atas lahan seluas satu hektare di kawasan Bandung. Setengah dari lahan itu difokuskan untuk tanaman dalam *greenhouse*, sedangkan sisanya untuk pengembangan lalapan khas Indonesia.

"Selada bisa panen dalam satu bulan, paprika sekitar dua hingga tiga bulan. Putaran usahanya cepat, dan pasarnya stabil," ujar Aisyah saat ditemui di kebunnya. Harga paprika yang ia jual ke restoran dan pengepul bisa mencapai Rp50 ribu per kilogram, sedangkan timun jepang ia lepas seharga Rp15 ribu per kilogram.

Namun bagi Aisyah, bisnis sayur bukan cuma soal cuan. Ia mendirikan Koperasi Konsumen Sobat Petani Lestari (MILFA) untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus sebagai wadah edukasi bagi anak muda. Dari sanalah Lalab Project lahir — sebuah gerakan memperkenalkan 718 jenis lalapan asli Indonesia kepada generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha.

Berbekal kemitraan dengan Kementerian Kesehatan, Gain Alliance, Rise Foundation, dan Health Heroes Indonesia melalui program Youth Nutritiative, Aisyah menanam aneka lalapan seperti pohpohan, katuk, pegagan, jelantir, kecipir, hingga ciplukan. Lahan seluas 300 meter persegi pun disulap menjadi kebun edukatif yang terbuka untuk kunjungan remaja dan sekolah.

"Banyak anak muda kita yang bahkan nggak tahu kalau lalapan itu bukan cuma selada. Padahal kekayaan pangan lokal kita luar biasa. Kalau nggak kita kenalkan sekarang, siapa lagi yang akan mewarisinya?" ujarnya.

Inovasi tak berhenti di situ. Lalab Project juga memanfaatkan teknologi smart farming autogrower yang hemat air dan tak perlu listrik. Sistem ini telah diimplementasikan di empat komunitas remaja dan sekolah, sebagai bagian dari edukasi pertanian berkelanjutan.

Hingga kini, Lalab Project telah menjangkau dan mengedukasi sedikitnya 119 remaja dalam satu bulan. Aisyah berharap program ini dapat terus berkembang, baik melalui agro-eduwisata mandiri maupun skema kemitraan yang melibatkan donor.

"Lalab itu bukan cuma sayur pendamping sambal. Di dalamnya ada identitas, keberagaman, dan cerita panjang tentang pangan kita," tutup Aisyah penuh semangat.

Nattasya/ Gesha

Inovasi Cabai Terbaru

Cabai menjadi salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan masyarakat. Berbagai jenis cabai kini telah dihasilkan dari hasil pemuliaan tanaman. IPB University kembali memperkenalkan inovasi unggul cabai. Apa saja?



Mirip Jambu Air, **Cabai Palurah** Rasanya Super Pedas

Cabai menjadi jenis penyedap masakan karena rasanya yang pedas. Bagi penikmat cabai dan petani, IPB University mengadirkan cabai super pedas bernama 'Cabai Palurah IPB'. Inovasi ini merupakan hasil pengembangan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Muhammad Syukur, bersama tim peneliti.

Berbeda dari cabai pada umumnya, cabai ini tampil dengan bentuk unik menyerupai jambu air. Di balik penampilannya yang eksotik, cabai Palurah menyimpan tingkat kepedasan ekstrim dan potensi biofarmaka yang luar biasa.

"Cabai ini kami beri nama 'Palurah IPB'," ungkap Prof Syukur. Cabai Palurah memiliki tingkat kepedasan 500 kali lebih pedas dari cabai besar biasa, bahkan lima kali lebih pedas dari cabai rawit terpedas yang ada saat ini.

Prof Syukur mengatakan, hingga saat ini belum ada varietas nasional cabai super pedas yang dilepas secara resmi oleh Kementerian Pertanian. Ada yang sudah terdaftar, baru varietas lokal seperti Katokkon dari Sulawesi Selatan. "Cabai Palurah ini merupakan hasil perakitan khusus untuk memenuhi kebutuhan super pedas dan telah kami daftarkan untuk dilepas secara nasional," katanya.

Tak hanya menjadi bumbu dapur, cabai ini juga menjanjikan manfaat lain di bidang kesehatan dan industri biofarmaka. Cabai Palurah IPB juga berpotensi sebagai bahan baku produk seperti koyo cabai yang selama ini masih banyak diimpor.

"Di Toraja, Sulawesi Selatan, cabai seperti ini sudah digunakan untuk konsumsi segar dan olahan. Namun, dengan adanya cabai Palurah yang dirakit khusus, harapannya bisa memenuhi kebutuhan nasional, baik untuk konsumsi maupun bahan biofarmaka," tambah Prof Syukur.

Dengan rasa pedas yang sangat kuat, penggunaannya dalam masakan juga menjadi jauh lebih efisien. "Cukup sedikit saja, sudah memberikan sensasi pedas maksimal," katanya seperti dikutip dari dikanal YouTube IPB TV. **Yul**

Neno TAVI, si Keriting Tahan Virus



Serangan penyakit keriting kuning akibat *Begomovirus* selama ini menjadi musuh bagi petani cabai di Indonesia. Meskipun tidak menyebabkan kematian tanaman, penyakit ini dapat menurunkan produktivitas secara drastis dan berdampak pada pendapatan petani. Kini hadir cabai keriting yang tahan terhadap penyakit keriting kuning.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Muhamad Syukur, berhasil mengembangkan varietas cabai keriting tahan virus bernama *Neno TAVI*. Varietas ini dirakit sebagai solusi jangka panjang menghadapi virus yang selama ini sulit dikendalikan.

"Di Indonesia penyakit utama tanaman cabai adalah keriting kuning yang disebut dengan

Begomavirus. Nah ini menjadi masalah di lahan petani. Kenapa? Karena tanamannya tidak mati, sehingga petani harus mengeluarkan biaya untuk memelihara, tapi tanaman tidak menghasilkan," katanya.

Masalahnya lagi lanjut Prof. Syukur adalah virus ini tidak ada obatnya dan sulit sekali mengendalikannya. Karena itu, untuk mengatasi virus keriting kuning, petani sering kali terpaksa mencabut tanaman, sehingga berujung pada kerugian besar. "Alternatif utama untuk budidaya cabai adalah merakit varietas yang tahan virus agar menguntungkan petani. Jadi memang kita kembangkan untuk petani," ujarnya.

Pengembangan varietas *Neno TAVI* diprioritaskan pada cabai keriting karena tingkat penggunaannya cukup luas, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Cabai keriting juga menjadi jenis cabai kedua paling banyak digunakan setelah cabai rawit merah di Indonesia.

Namun demikian, Prof Syukur mengatakan, varietas baru ini tetap mempertahankan karakteristik yang diinginkan konsumen. Misalnya, rasa pedas yang kuat, ukuran buah yang optimal, dan produktivitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan terhadap virus tidak mengorbankan kualitas cabai.

"Rasa pedasnya tetap tinggi. Ukurannya juga optimal, produktivitasnya tinggi dan preferensi konsumen tidak berkurang sama sekali. Jadi memang arahnya, selain membantu petani, juga memenuhi kebutuhan konsumen," katanya seperti dikutip dari laman IPB.ac.id.

Selain menjadi solusi agronomis, Prof. Syukur mengungkapkan, varietas *Neno TAVI* juga dinilai strategis dalam membantu stabilisasi harga dan pasokan cabai nasional, terutama saat musim paceklik. Karena itu ia berharap kehadiran varietas ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi sektor pangan.

Untuk tahap awal, benih *Neno TAVI* sudah mulai diseminasi kepada petani yang ingin mencoba membudidayakan. Namun, proses komersialisasi dalam skala luas masih menunggu proses perizinan resmi seperti surat keputusan (SK) pelepasan atau pendaftaran varietas untuk komersialisasi.

Kehadiran varietas *Neno TAVI* diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya menuju kemandirian, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani cabai di Indonesia. **Yul**

Lepas Ekspor Pertanian, Wamentan Apresiasi Milenial Jawa Tengah

Generasi muda mulai membuktikan bahwa sektor pertanian menjadi ladang usaha yang menjanjikan. Salah satunya milenial di Jawa Tengah yang berhasil membawa produk pertanian seperti ubi madu, gula semut dan sayur organik ke mancanegara.



Pelepasan ekspor komoditas pertanian bernilai Rp 1,335 miliar tersebut dilakukan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono pada kegiatan Pekan Agro Digital dan Inovasi (PADI) 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (20/7).

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian berkomitmen penuh mendukung ekspor melalui fasilitas akses pasar, pelatihan, dan lainnya. “Kita ingin menempatkan komoditas hortikultura, perkebunan, dan pertanian Indonesia menjadi juara dunia. Jawa Tengah, selain tanahnya subur, rakyatnya telaten dan rajin. Tinggal kita pemerintah memfasilitasi pelatihan, akses pasar, dan fasilitas lainnya,” kata Sudaryono.

Pada kesempatan itu Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar juga mengapresiasi kerja keras, jejaring, inovasi, dan upaya petani milenial Jawa Tengah yang telah melakukan ekspor. Ekspor senilai total Rp1,335 miliar terdiri dari 70 ton ubi madu senilai Rp 840 juta, ekspor 1,5 ton gula semut ke Malaysia senilai Rp375 juta, dan ekspor 1 ton sayuran organik ke Singapura dengan nilai Rp120 juta.

Mas Dar menekankan, pemerintah akan terus memfasilitasi program pelatihan dan pemberdayaan petani milenial untuk dapat mengangkat komoditas pertanian ke kancah global. Sebab, ekspor pertanian bukan hanya soal pengiriman produk, tetapi juga peningkatan nilai tambah devisa dan kesejahteraan petani.

Untuk itu, Mas Dar mengajak petani untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas. Tidak hanya itu, Wamentan berjanji akan menggerakkan petani untuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung budidaya pertanian.

”Saya ingin kita semua nanti berpartisipasi. Saya minta Ketua Petani Milenial dan pasukannya bertemu saya. Nanti kita petakan, sentra ekspor dimana?



produksinya apa? dan sebagainya. Semua harus dipetakan. Sekarang kita bisa gunakan teknologi, aplikasi untuk mendukung pertanian kita,” tuturnya.

Wamentan juga mengingatkan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Salah satunya dengan memanfaatkan jejaring diaspora untuk memperluas akses pasar. “Negara lain butuh minyak, sayur, buah-buahan kita. Ini saya sudah bicara dengan diaspora di Belanda, bagaimana nanti itu bisa disambungkan menjadi business matching. Intinya pemerintah akan dukung dan fasilitasi petani kita,” ungkapnya.

Andil Program YESS

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan komitmen penuh terus mendukung ekspor dan mendorong regenerasi petani. Salah satunya lewat Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS).

Kegiatan PADI merupakan agenda strategis tahunan yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Petani Milenial Jawa Tengah. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengungkapkan, PADI 2025 akan menjadi rangkaian agenda nasional yang diinisiasi Program YESS yaitu pelepasan ekspor komoditas pertanian dan *business matching*.

“Forum ini menjadi platform kolaboratif bagi aktor muda pertanian untuk mempertemukan inovasi, teknologi, pasar, dan kebijakan dalam satu panggung. BPPSDMP kembali memfasilitasi pelepasan ekspor untuk ketiga kalinya pada tahun 2025, sebuah bukti nyata bahwa ekspor pertanian milik semua, bukan hanya konglomerat besar,” ungkapnya.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Program YESS dalam mencetak petani muda yang tangguh dan kompetitif di pasar global adalah capaian ekspor sejumlah komoditas unggulan oleh petani milenial. Dari total nilai ekspor yang berhasil dicapai tahun ini mencapai Rp1,335 miliar, salah satunya adalah Rayndra Syahdan Mahmudin, Young Ambassador Agriculture sekaligus Ketua Duta Petani Milenial/Andalan, yang sukses mengekspor gula semut ke Malaysia sebanyak 1,5 ton dengan nilai transaksi sebesar Rp375 juta.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, sekaligus Direktur Program YESS, Muhammad Amin, juga menegaskan pentingnya momentum ini. Business matching seperti ini menurutnya, memberikan peluang besar bagi petani muda untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada buyers. “Ini adalah langkah awal yang penting untuk membangun kerja sama jangka panjang dan membuka potensi pasar global yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi para petani milenial, yang telah membuat PADI 2025, karena mampu membuat acara yang sangat edukatif. “Pekan agro digital dan inovasi yang diinisiasi oleh kawan-kawan petani milenial ini yang kita banggakan, karena ternyata petani milenial ini semangat dan memberikan edukasi,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan terus mendorong anak muda untuk berkarya di bidang pertanian agar terjadi regenerasi petani guna menjaga ketahanan pangan di Jateng. Sebab, akses generasi muda terhadap pertanian sangat penting. Bahkan dengan kehadiran milinial, masyarakat tak lagi menganggap bertani sebagai profesi kelas dua.

“Sektor pertanian ini bukan pelengkap, tetapi fondasi. Kita harus tempatkan petani di hati masyarakat,” kata Taj Yasin. Karena itu, ia berharap, PADI 2025 dapat menjadi pemantik semangat bersama untuk menempatkan sektor pertanian sejajar dengan sektor lain dalam kontribusi pembangunan.

Pada kesempatan ini, Program YESS turut menghadirkan Young Ambassador Agriculture (YAA) untuk memberikan inspirasi dalam sesi talkshow “Sukses Menjadi Petani Milenial di Era Digital” sebagai upaya mendorong minat dan semangat generasi muda di sektor pertanian. Kehadiran YAA turut menyemarakkan acara ini melalui partisipasi dalam diskusi interaktif serta pameran, yang menampilkan gagasan dan karya mereka di sektor pertanian. **Pusdiktan BPPSDMP**



Gapoktan Mlale, 16 Tahun jadi Penyalur Pupuk Subsidi

Pemerintah saat ini membuka kesempatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi penyalur pupuk subsidi. Sebuah peluang, tapi juga tantangan tersendiri bagi kelembagaan petani tersebut. Namun Gapoktan lain bisa belajar dari kisah Gapoktan Mlale, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang telah hampir 16 tahun menjadi penyalur pupuk.

Ada sosok-sosok pejuang di balik layar yang tak kenal lelah. Mereka adalah para pengurus GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Mlale, sebuah wadah yang menyatukan semangat 559 petani dari 11 kelompok tani di desa tersebut.

Ketua Gapoktan Mlale, Ngadiman, menceritakan perjalanan panjang Gapoktan sejak menjadi penyalur pupuk bersubsidi pada tahun 2009. “Perjuangan kami betul-betul pahit. Demi memastikan pupuk sampai ke tangan petani, gapoktan selalu siap 24 jam. Kapan pun petani butuh, kami buka,” ujar Ngadiman.

Dengan total luasan lahan 509 hektar, Gapoktan Mlale terdiri dari 6 kelompok tani pangan dan 5 kelompok tani perkebunan. Komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi, jagung, dan tebu. Sumber permodalan utama berasal dari dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), yang telah membantu Gapoktan tetap bertahan.

Ngadiman mengakui, dari tujuh Gapoktan di Kecamatan Jenar, hanya lima yang mampu maju sebagai penyalur pupuk. Salah satu kuncinya adalah soliditas antar kelompok tani dan dukungan penuh dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta pemerintah desa.

Untuk menjadi penyalur resmi pupuk bersubsidi atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS), Gapoktan Mlale harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang ketat, mulai dari legalitas badan usaha, NPWP, NIB dengan KBLI 47763, hingga memiliki gudang dengan kapasitas minimal 5 ton. “Untuk gudang kami menjalin kerja sama dengan petani yang memiliki gudang demi memenuhi kriteria tersebut” ungkapnya.

Meski demikian, tantangan tak pernah surut. “Modal kami seringkali tidak cukup. Bantuan PUAP Rp 100 juta tidak selalu bisa menutup kebutuhan, apalagi saat musim tanam serentak. Kami sering harus memutar otak mencari pinjaman demi kelancaran penebusan pupuk,” ungkap Ngadiman.

Selain permodalan, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. “Kami sangat bergantung pada penyuluh dan pendamping. Alhamdulillah, sejauh ini kekompakan antar Gapoktan, Poktan, dan penyuluh tetap terjaga,” tambahnya.

Gapoktan Mlale juga menyuarakan aspirasi terkait regulasi penyaluran pupuk yang kerap berubah-ubah. Salah satu permintaan utama adalah kenaikan margin dari Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk. “Margin kami saat ini sangat minim, hanya Rp 10.000 per sak. Dengan banyak biaya operasional yang harus dikeluarkan, kami mohon ada penyesuaian agar distribusi tetap berjalan lancar,” kata Ngadiman.

Selain itu, para petani di Mlale juga berharap sistem penyaluran tetap mengakomodir penggunaan Kartu Tani. “Petani merasa Kartu Tani lebih praktis. Kalau ada keperluan mendesak, mereka bisa diwakili anak atau keluarga tanpa perlu mengurus surat kuasa bermaterai seperti sistem I-Pubers,” jelas Ngadiman.

Gapoktan Mlale mengusulkan agar kebijakan pupuk bersubsidi, termasuk jenis pupuk seperti SP36 dan ZA, bisa kembali disubsidi untuk mendukung hasil panen yang lebih melimpah. Mereka juga meminta agar perubahan aturan berlaku sejak awal tahun. **Herman/Yul**

TABLOID SinarTani
PERTANIAN INDONESIA BARU
SINTA TV

PRICE LIST
BERLANGGANAN



SINAR TANI CETAK
RP. 16.000
Per Edisi
Minimum Pembelian
Rp 64.000/BLN
Rp 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER
Rp. 72.000/ Thn

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Nomor Whatsapp : .....
Email : .....
Jabatan : .....

No rek : 127.0096.016.587
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

CONTACT
081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SINTA TV



Dimeriahkan Oleh Berbagai Acara

- **PAMERAN**
  Saprodi Pertanian
- **SOSIALISASI**
- **DIALOG INTERAKTIF**
- **BERBAGAI LOMBA**
- **GERAKAN PANGAN MURAH**
- **REMBUG PETANI**
- **DEMO ALSINTAN**

Didukung Oleh:

BADAN PANGAN NASIONAL · PETROKIMIA KAYAKU · BENIH PERTIWI · LORENTZ Sun. Water. Life. · CORTEVA agriscience · RAJA · BISI · corin · m2u · FROGS INDONESIA · ADVANTA

UD Agro nusantara prima

Filosofi Lidi

Koperasi Desa Merah Putih

Lahirnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi harapan baru menggerakkan ekonomi desa. Memakai filosofi lidi, KDMP merupakan sebuah kekuatan baru ekonomi di tengah gurita kapitalisme.



Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen sejarah baru bagi dunia koperasi di Indonesia. Lembaga yang selama ini terkesan kusam dan kumuh kini terangkat kembali menjadi sebuah kekuatan ekonomi dari akar rumput di desa.

Pemerintah telah menargetkan lahir 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. “Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita memulai suatu usaha besar. Koperasi adalah alat perjuangan bagi mereka yang lemah. Yang kuat membuat PT, holding, incorporated. Tapi bagi rakyat kecil, koperasi adalah kekuatan kolektif,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, koperasi adalah solusi konkret dan struktural untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Mengutip filosofi lidi, orang nomor satu di Indonesia ini menggambarkan bahwa satu lidi mudah patah, tapi jika diikat bersama menjadi sapu yang kuat.

“Jadi konsep koperasi ibarat lidi. Lemah jika berdiri sendiri, namun menjadi kuat bila disatukan. Begitulah prinsip koperasi bekerja: dari individu-individu lemah menjadi kekuatan besar saat bersatu,” tuturnya.

Menurut Presiden, semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi inti dari gerakan koperasi. Diharapkan koperasi nantinya mampu mengangkat kekuatan ekonomi rakyat kecil menjadi pilar kekuatan nasional. “Konsep koperasi itu gotong royong. Dari yang lemah-lemah jadi kuat. Dari ekonomi lemah, menjadi kekuatan ekonomi. Ini adalah cara kita membangun dari bawah,” ujarnya.

Bahkan Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai lewat kemandirian ekonomi. Politik merdeka saja tidak cukup jika rakyat masih bergantung pada kekuatan ekonomi asing atau segelintir orang kuat. “Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Koperasi adalah sarana untuk mencapai kedaulatan itu,” tegasnya.

Prabowo menyampaikan bahwa koperasi jarang disukai kalangan pemilik modal besar atau kapitalis. Gerakan koperasi justru dianggap sebagai potensi pesaing karena mampu menyatukan kekuatan ekonomi rakyat kecil.

“Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Mereka merasa koperasi bisa jadi saingan,” ucapnya. “Dengan demikian, koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi ketika bersatu, dari yang lemah bisa menjadi kuat. Itu kekuatan koperasi,” tambah Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, hingga kini sebanyak 80.081 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah resmi terbentuk di seluruh Indonesia. Bahkan sebanyak 108 koperasi sudah siap beroperasi.

Nantinya Koperasi Desa Merah Putih akan menyediakan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam hal pangan serta turut mempertimbangkan potensi di masing-masing desa. “Kita tidak boleh bergantung pada impor pangan. Kita harus berdaulat, berswasembada pangan, air, dan energi. Kita harus memberdayakan petani kita sendiri dengan sistem yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Tonggak Sejarah Koperasi

Sementara itu, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, peluncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada puncak perayaan Hari Koperasi Nasional ke 78 menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan koperasi di Indonesia. Program Kopdes/ Kel Merah Putih ini adalah lompatan besar dalam membangkitkan kembali semangat ekonomi gotong royong.

Budi Arie berharap, koperasi desa tidak hanya akan menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga menjadi simpul utama distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pemotong rantai distribusi yang selama ini merugikan masyarakat kecil. “Kita optimis, tadi Pak Presiden sampaikan jangan sampai seperti dulu dimana ketua untung duluan. Sekarang ini eranya Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih adalah rakyat harus untung duluan,” ujarnya.

Setelah beroperasi, Kopdes/Kel Merah Putih ini nantinya ditargetkan dapat menjadi alat strategis untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka stunting hingga menghilangkan peran tengkulak/rentenir yang selama ini merugikan masyarakat.

Bagi koperasi-koperasi yang belum dapat berjalan dengan baik, Kementerian Koperasi bersama stakeholder lainnya akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan. ”Nanti yang belum beroperasi kita akan dorong supaya semua koperasi desa/ kelurahan Merah Putih ini bisa segera beroperasi,” katanya.

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan usaha dari Kopdes/ Kel Merah Putih serta menghindari potensi fraud yang akibat salah kelola, Kemenkop menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. Hal ini diperlukan sebagai langkah preventif menghindari penyalahgunaan anggaran/pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi.

Budi Arie menegaskan. untuk meningkatkan sistem pengawasan yang handal, Kopdes/ Kel Merah Putih didorong untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya. Pihaknya menargetkan dalam 3-4 tahun ke depan keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan tumbuh pesat dan menumbuhkan simpul ekonomi baru di desa-desa.

”Kita tidak mau program ini gagal, karena itulah keterlibatan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menggerakkan dan juga mengawasi pengoperasian koperasi desa Keluar Merah Putih,” kata Budi Arie.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, selaku Koordiantor Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih berharap Oktober 2025 seluruh Kopdes/Kel Merah Putih yang telah diresmikan dapat beroperasi sepenuhnya. Dengan target ini diharapkan kehadiran Kopdes dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Pada saat tahap operasional, Wamenkop menekankan pentingnya persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait. Strategi ini diharapkan eksistensi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat berkembang sesuai target pembentukannya.

“Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah berharap koperasi dapat mengejar ketertinggalan, memperkuat aset, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing secara nasional,” katanya. **Yul**

Pupuk Gak Perlu Banyak, **Asal Tepat**

Pupuk bersubsidi tuh ibarat bantuan negara buat petani. Tapi sayangnya, banyak yang masih pakai asal-asalan, asal tebar, asal banyak, asal jadi. Padahal, kalau tahu triknya, pupuk subsidi bisa bikin panen tetap maksimal tanpa boros.



Setiap jenis pupuk punya tugas masing-masing. Misalnya, urea kaya nitrogen buat pertumbuhan daun, NPK buat seimbang, dan SP-36 buat akar dan bunga. Nah, tanaman juga nggak bisa asal dicampur semua, ada waktunya, ada dosisnya.

Misalnya, buat jagung muda, kasih urea dulu biar daunnya lebat. Tapi pas udah mulai berbunga, kasih NPK biar tongkolnya gede.

Pupuk paling baik diserap saat tanaman aktif tumbuh. Jangan pupuk pas hujan deras, pupuknya cuma lari ke got. Mending tunggu tanah lembap, tapi nggak becek.

Pemupukan dasar bisa dilakukan saat tanam. Sedangkan pemupukan susulan sekitar 3 minggu setelah tanam, tergantung jenis tanamannya.

Kebanyakan pupuk malah bisa bikin tanah jadi "panas" dan tanaman stres. Kalau tanahnya udah subur, dosis bisa dikurangi. Gunakan panduan penyuluh atau label di karung sebagai acuan.

Misalnya buat padi, cukup 100 kg urea dan 150 kg NPK per hektare. Jangan tebar kayak ngasih makan ayam.

Mau lebih hemat dan tanah makin sehat? Gabungkan pupuk kimia dengan pupuk kandang atau kompos. Rasio 1:1 cukup oke buat pertanian kecil. Selain hemat, ini juga jaga kesuburan tanah jangka panjang.

Jangan simpan pupuk di tempat lembap atau sembarangan. Bisa menggumpal, bau, bahkan hilang. Simpan di gudang tertutup dan kering, kasih label, dan jangan lupa dikunci.

Ingat, pupuk bersubsidi itu bukan cuma murah, tapi juga terbatas. Jadi, jangan sampai mubazir. Rawat baik-baik, aplikasikan dengan cermat, dan panen pun bisa makin mantap!

Nattasya

Tabloid Sinar Tani | Tabloid Sinartani.com | SINTA TV

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Segenap Direksi dan Karyawan Tabloid Sinar Tani
Mengucapkan :

Turut Berduka Cita

Atas meninggalnya :

BAPAK HERRY KRISTANTO

Direktur Advanta Seeds Indonesia



"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran."

Potensi Luar Biasa, Mentan Pacu Hilirisasi Padi dan Kelapa Riau

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong transformasi sektor pertanian di Provinsi Riau menuju kemandirian pangan. Transformasi pertanian harus difokuskan pada tiga hal yakni cetak sawah, pengembangan kelapa, dan pembangunan irigasi.



Dalam kunjungan kerjanya ke Pekanbaru, Selasa (22/7), Mentan menegaskan pentingnya memperkuat produksi pangan sekaligus mengembangkan hilirisasi komoditas strategis seperti padi dan kelapa untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan krisis iklim dan ketidakpastian global.

"Potensi Riau luar biasa, penduduknya 7 juta orang, pangan harus beres. Karena itu Presiden meminta kita fokus pada empat hal yakni, swasembada pangan, pangan bergizi, biofuel, dan hilirisasi," ujar Mentan Amran saat menghadiri Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam, Optimalisasi Lahan, dan Cetak Sawah Rakyat di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.

Menurut Mentan, Riau baru memanfaatkan sekitar 20 persen potensi lahannya, sehingga produksi beras lokal hanya mampu memenuhi 22 persen dari kebutuhan masyarakat yang mencapai 662 ribu ton per tahun.

Melihat peluang tersebut, Kementan siap membantu agar Riau mampu meningkatkan produksinya hingga 50 ribu ha dalam 2-3 tahun mendatang dengan estimasi dukungan senilai Rp1,7 triliun. "Kita harus menyiapkan pangan bagi generasi mendatang, 50-100 tahun kedepan, dimulai dari sekarang, tinggal menunggu komitmen dari Pak Gubernur dan Para Bupati, kami siap bantu," ujar Amran.

Selain sektor pangan, Mentan juga menyoroti pentingnya hilirisasi kelapa sebagai kekuatan ekonomi baru Riau. Dengan potensi kelapa rakyat yang besar dan peluang pasar global yang menjanjikan, kelapa dinilai bisa menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan. "Kami akan investasi Rp371 miliar untuk industri kelapa. Dengan hilirisasi, harga kelapa bisa naik ribuan persen, dan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani," jelas Amran.

Mentan menegaskan transformasi pertanian di Riau harus difokuskan pada tiga hal yakni cetak sawah, pengembangan kelapa, dan pembangunan irigasi. Ia yakin, kemandirian pangan akan menekan inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong kesejahteraan petani. "Gagasan tanpa tindakan itu nol. Saatnya kita bergerak," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh agenda strategis nasional di sektor pangan. Ia menyebutkan, luas baku sawah di Riau saat ini mencapai 59 ribu ha, namun baru memenuhi 22 persen kebutuhan daerah. "Dengan dukungan pusat, produksi padi tahun lalu naik 7 persen dan tahun ini diproyeksikan meningkat 12 persen," kata Wahid.

Ia juga menyoroti potensi kelapa rakyat di Riau yang tersebar di berbagai kabupaten dengan total lebih dari 400 ribu ha, namun masih minim fasilitas pengolahan. Ia berharap dukungan penuh pemerintah pusat untuk mendorong hilirisasi sehingga nilai jual petani bisa meningkat. "Kami siap berkolaborasi mencari solusi. Harapan kami, ke depan, Riau mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutup Wahid. **Yul**

Salurkan Beras SPHP, Bulog Siap Gandeng Kopdes Merah Putih



Perum BULOG akan menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam menyalurkan beras SPHP sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional dan kemandirian desa. Keterlibatan BULOG dalam program ini menjadi bagian dari sinergi lintas sektor yang bertujuan mengoptimalkan peran koperasi desa dalam mendistribusikan pangan, memperkuat cadangan pangan lokal, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita menyampaikan bahwa BULOG siap berperan aktif dalam memastikan program ini berjalan efektif, terutama dalam aspek penguatan pasokan dan distribusi bahan pangan strategis ke seluruh pelosok desa.

"Program KDKMP sejalan dengan visi BULOG dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia. Kami siap mensuport dan bermitra dengan koperasi desa dalam mendistribusikan beras dan bahan pokok lainnya, sekaligus menjadi bagian dari sistem logistik pangan nasional yang tangguh," ujar Febby saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran KDKMP di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

Melalui KDKMP, BULOG akan menyalurkan bahan pangan pokok seperti beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), beras premium, minyak goreng, gula, dan produk pangan BULOG lainnya ke koperasi-koperasi desa. Kerja sama ini tidak hanya membantu stabilitas pasokan, namun juga mendorong partisipasi aktif desa dalam menjaga ketahanan pangan dari tingkat bawah.

"Kami berharap koperasi desa menjadi simpul kekuatan ekonomi rakyat. BULOG hadir untuk memperkuat rantai pasok pangan hingga ke desa terpencil dan menjaga agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat," tambah Febby.

BULOG juga membuka peluang kolaborasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah bersama koperasi desa, termasuk pembinaan dalam sistem distribusi dan manajemen stok berbasis digital. "Program ini diharapkan menjadi contoh model distribusi pangan yang efisien dan inklusif di masa depan," kata Febby.

Program KDKMP merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang digerakkan bersama oleh Kementerian/Lembaga dan sektor BUMN untuk membangun kemandirian pangan dari desa. Dengan menggandeng koperasi sebagai penggerak utama, program ini menjadi wadah integratif antara produksi lokal, distribusi, dan pemberdayaan masyarakat desa.

"BULOG juga memiliki outlet binaan, dengan nama RPK (Rumah Pangan Kita) dan KDMP Bentangan Klaten ini sudah dilakukan tapi dengan RPK, sehingga KDMP ini juga dapat mendistribusikan beras BULOG berkualitas premium seperti Befood Setra Ramos, Befood Punokawan, dan Beras Befood Slyp Super." Tuturnya.

RPK merupakan outlet milik masyarakat yang dibina BULOG dan dapat mendistribusikan berbagai macam komoditi yang dimiliki BULOG. Hingga kini sudah lebih dari 103 KDKMP di seluruh Indonesia yang telah dilakukan tap in dengan RPK BULOG, serta ratusan KDKMP lainnya yang masih dalam proses. **Yul**

Konsumsi Vitamin, **Pilih Alami atau Sintetis?**

Sehat menjadi rezeki yang tak bisa dibayarkan dengan uang. Karena itu, berbagai cara kini masyarakat lakukan agar tetap bisa sehat. Dari mulai berolahraga, mengonsumsi makanan sehat dan vitamin. Vitamin menjadi komponen penting dalam menjaga kesehatan.



Banyak pilihan jenis vitamin. Ada yang berasal dari bentuk alami maupun sintetis. Pertanyaannya, sebaiknya mengonsumsi yang mana? Dosen Fakultas Kedokteran (FK) IPB University, dr Agil Wahyu Wicaksono, MBiomed menjelaskan, perbedaan mendasar, dosis penggunaan, hingga manfaat antara keduanya.

"Vitamin sintetis dan alami memiliki asal-usul yang berbeda. Vitamin alami diperoleh dari sumber makanan utuh seperti tumbuhan dan hewan. Sementara vitamin sintetis dibuat di laboratorium melalui proses kimia untuk meniru struktur kimia vitamin alami," tuturnya seperti dikutip dari laman IPB University.

Dalam hal penyerapan oleh tubuh atau bioavailabilitas, dr. Agil mengungkapkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bentuk sintetis dari nutrien tertentu, seperti folat, dapat lebih mudah diserap dibandingkan bentuk alaminya. Namun dari segi dampak kesehatan, ada penelitian yang menyatakan bahwa vitamin alami memiliki keunggulan. Misalnya, dalam mendukung kesehatan kardiovaskular.

Meski demikian, studi lain tidak menemukan perbedaan signifikan antara bentuk sintetis dan alami untuk vitamin tertentu seperti vitamin C. "Karena itu, pemilihan antara vitamin sintetis dan alami sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan individu, keterbatasan diet, serta tujuan kesehatan secara keseluruhan," tuturnya.

Manfaat dan Risiko Vitamin Sintetis

Lebih jauh, dr Agil menuturkan, vitamin sintetis dapat bermanfaat untuk mengatasi kekurangan nutrisi tertentu. Konsumsi vitamin sintetis dalam jangka panjang memberikan manfaat penting, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien bagi individu yang mengalami kekurangan gizi atau memiliki kondisi tertentu seperti kehamilan, usia lanjut, atau gangguan penyerapan.

Kelebihan lainnya, vitamin sintetis juga lebih stabil, memiliki umur simpan yang lebih lama, dan memungkinkan pemberian dosis yang presisi. Karena itu, sering digunakan dalam terapi medis untuk mengatasi defisiensi vitamin.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya untuk mempertimbangkan manfaat dan risikonya secara menyeluruh. Penggunaannya dalam jangka panjang juga mengandung risiko. "Salah satu risiko utama adalah toksisitas akibat akumulasi vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K di dalam tubuh. Hal ini dapat menimbulkan efek samping serius, termasuk kerusakan hati dan gangguan sistem saraf," ungkapnya.

Selain itu, beberapa bentuk sintetis seperti dl-α-tokoferol (vitamin E sintetis) memiliki aktivitas biologis yang lebih rendah dibandingkan bentuk alaminya, sehingga efektivitasnya bisa berbeda. Karena itu, meskipun vitamin sintetis bermanfaat, dr Agil berpesan sebaiknya digunakan dengan bijak dan di bawah pengawasan medis untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan.

Dosis yang Disarankan

Untuk menghindari efek toksik, dr Agil mengungkap pentingnya memperhatikan batas asupan harian. Dosis suplemen disesuaikan berdasarkan kebutuhan individu, memperhatikan angka kecukupan gizi, serta menghindari konsumsi melebihi tolerable upper intake level (UL), kecuali atas saran dokter atau ahli gizi.

"Vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin C dan vitamin B kompleks, umumnya lebih aman dikonsumsi dalam jumlah lebih tinggi karena kelebihannya akan dibuang melalui urin, meskipun tetap memiliki batas yang dianjurkan," katanya.

dr Agil mencontohkan, dosis harian vitamin C yang direkomendasikan adalah 75–90 mg. Namun, batas atas yang dianggap aman adalah 2.000 mg per hari. Sementara itu, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K lebih mudah menumpuk di dalam tubuh sehingga lebih berisiko menimbulkan toksisitas.

Untuk dosis harian vitamin A yang direkomendasikan sekitar 700–900 mikrogram *retinol activity equivalents* (RAE). Asupan di atas 3.000 mikrogram RAE dapat menyebabkan efek toksik. Batas aman vitamin D sekitar 100 mikrogram (4.000 IU) per hari, meskipun dosis terapeutik bisa lebih tinggi di bawah pengawasan medis.

Dengan memahami perbedaan, manfaat, dan risiko antara vitamin sintetis dan alami, serta memperhatikan dosis yang tepat dan kondisi kesehatan individu, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih informatif mengenai suplementasi vitamin. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi tetap menjadi langkah terbaik untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. **AS/Yul**

Kondisi Vitamin Sintetis Diperlukan

Dalam beberapa kondisi penyakit, asupan suplemen vitamin sintetis diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi atau mendukung kebutuhan kesehatan tertentu. Beberapa diantaranya.



1. Penyakit hati (seperti sirosis): menyebabkan kekurangan nutrisi yang memerlukan suplementasi, khususnya vitamin K.
2. Neuropati.
3. Gangguan malabsorbsi (penyakit celiac): pemberian suplemen diperlukan akibat menghambatnya penyerapan vitamin.
4. Malnutrisi umum: membutuhkan suplemen untuk mengatasi berbagai kekurangan gizi
5. Penyakit ginjal kronis: memerlukan suplemen vitamin D.
6. Kondisi kulit (dermatitis eksfoliatif): memerlukan suplemen retinoid (vitamin A sintetis).
7. Gangguan perdarahan: ditangani dengan suplemen vitamin K.
8. Kehamilan dan menyusui: dianjurkan mengonsumsi suplemen untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi di tengah meningkatnya kebutuhan vitamin.